



**UPAYA HUKUM KURATOR UNTUK MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK KARYAWAN PADA
PERUSAHAAN YANG DIPUTUS PAILIT SETELAH PUTUSAN MK
NO. 67/PUU-XI/2013**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

**Jefri Ariman Sitopu, S.H.
11010116410064**

PEMBIMBING :

Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2017**

**UPAYA HUKUM KURATOR UNTUK MEMBERIKAN PERLINDUNGAN
HUKUM ATAS HAK KARYAWAN PADA PERUSAHAAN YANG
DIPUTUS PAILIT SETELAH PUTUSAN MK NO. 67/PUU-XI/2013**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 11 Januari 2018

Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum

Disusun oleh :

Jefri Ariman Sitopu, S.H.
11010116410064

Pembimbing,

**Ketua Program
Magister Ilmu Hukum,**

Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S
NIP. 19611005 198603 1 002

Prof. Dr. Suteki, S. H., M. Hum
NIP. 197002021994031001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. (Filipi 4 : 13)

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk:

1. Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang selalu memberikan berkat kepintaran, kesehatan serta hikmad.
2. Kedua orang tua saya tercinta yang selalu memberikan dukungan moril dan materil dalam penulisan tesis ini.
3. Adik-adik tercinta, yang selalu memberikan motivasi.
4. Sahabat-sahabatku di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Angkatan 2016 khususnya Magister Ilmu Hukum Akhir Pekan, terima kasih atas persahabatan, pengalaman dan ilmu pengetahuan yang telah kalian berikan.
5. Almamater.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian tesis ini yang berjudul “*Upaya Hukum Kurator Untuk Memberikan Perlindungan Hukum Atas Hak Karyawan Pada Perusahaan Yang Diputus Pailit Setelah Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013*”. Peneliti menyadari bahwa penelitian dapat terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH., M.Hum, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
2. Prof. Dr. R Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
3. Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
4. Dr. Kholis Roisah, S.H., M.Hum selaku Sekretaris Bidang Akademik Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
5. Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S selaku dosen pembimbing yang dengan sabar sepenuh hati memberikan bimbingan dan motivasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini;
6. Bapak/Ibu Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang dengan tulus, sabar dan sepenuh hati telah memberikan ilmu pengetahuan, berbagi pengalaman, dan memotivasi anak didiknya;

7. Bapak/Ibu Bagian Akademik dan Bagian Keuangan Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang dengan ketulusannya membantu peneliti untuk dapat menyelesaikan pendidikannya;

Akhir kata semoga hasil penelitian atas tesis ini dapat bermanfaat dan memberikan ilmu pengetahuan bagi pembaca.

Semarang, Desember 2017

Jefri Ariman Sitopu, S.H.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini Jefri Ariman Sitopu, S.H. dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri dan dalam tesis ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi atau lembaga pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka.
2. Tidak berkeberatan untuk dipublikasikan oleh Universitas Diponegoro dengan sarana apapun, baik seluruhnya atau sebagian untuk kepentingan akademik atau ilmiah yang non komersial sifatnya dengan terlebih dahulu mendapatkan izin dari saya.

Semarang, Desember 2017

Yang menyatakan

Jefri Ariman Sitopu , S.H.

ABSTRAK

Kepentingan karyawan suatu perusahaan yang dinyatakan pailit adalah yang berkaitan dengan pembayaran upah dan pesangon. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, pembayaran upah pekerja didahulukan dari tagihan pajak dan kreditur lainnya, Mahkamah Konstitusi memberi alasan bahwa upah pekerja yang belum dibayar debitor sebelum diputus pailit, merupakan hak dasar pekerja yang tidak boleh hapus maupun dikurangi. Salah satu bagian terpenting dalam penyelesaian perkara kepailitan adalah kurator. Kurator dalam menjalankan tugas dituntut untuk memiliki integritas yang berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta keharusan untuk menaati standar profesi dan etika. Keharusan ini bertujuan menghindari adanya benturan kepentingan dengan debitor ataupun kreditor.

Tugas Kurator dalam mengimplementasikan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 saat ini masih berdasarkan pada ketentuan dalam Undang-undang No.37 Tahun 2004, walaupun dalam praktek UU No. 37 Tahun 2004 belum dapat mengakomodasi Kurator dalam melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013.

Rekomendasi kepada Pemerintah agar revisi terhadap Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang saat ini sedang dalam proses seharusnya memberikan pengaturan tentang kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan Kurator, pelaksanaan hak-hak kreditor separatis, kreditor pajak, kreditor dengan hak retain dan kreditor buruh sehubungan dengan pembagian hasil penjualan boedel pailit.

Kata Kunci : Putusan Mahkamah Konstitusi, Kepailitan, Hak Pekerja

ABSTRACT

The interests of employees of a company declared bankrupt are related to the payment of wages and severance pay. Based on the decision of the Constitutional Court, the payment of worker's wages takes precedence over other taxes and creditor bills, the Constitutional Court provides the excuse that the wages of unpaid workers of the debtor before being terminated by bankruptcy are the basic rights of workers that should not be abolished or reduced. One of the most important parts in the settlement of bankruptcy cases is the curator. The curator in performing the duties is required to have integrity that is guided by the truth and justice and necessity to comply with professional and ethical standards. This requirement aims to avoid any conflict of interest with the debtor or creditor.

The assignment of the Curator in implementing Decision of the Constitutional Court No. 67 / PUU-XI / 2013 is still based on the Law on Bankruptcy No.37 of 2004, although in practice Law on Bankruptcy has not been able to accommodate the Curator in implementing Constitutional Court's decision no. 67 / PUU-XI / 2013.

Recommendations to the Government for the revision of Law on Bankruptcy concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations currently under process should provide for the regulation of legal certainty on the execution of the duties and authorities of the Receiver, the exercise of the rights of separatist creditors, tax authorities, creditor with the right of retain and creditors of labor in connection with the distribution of proceeds from the sale of bankruptcy boedel.

Keywords: Constitutional Court's Decision, Bankruptcy, Employee's Rights

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
SURAT PERNYATAAN	vi
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Permasalahan	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
1. Tujuan Penelitian	12
2. Manfaat Penelitian	13
D. Kerangka Pemikiran, Kerangka Konseptuan, Dan Kerangka Teoritik	
.....	13
1. Kerangka Pemikiran	13
2. Kerangka Konseptual	14
3. Kerangka Teoretik	23
E. Metode Penelitian	33
1. Pendekatan Penelitian	33
2. Spesifikasi Penelitian	34
	ix

3. Sumber Data	35
4. Metode Pengumpulan Data	37
5. Metode Analisis Data	38
F. Sistematika Penulisan	39
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	40
A. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan.....	40
1. Pengertian Kepailitan	40
2. Dasar Hukum Kepailitan	42
3. Faktor dan Asas Kepailitan	47
4. Syarat- syarat pengajuan permohonan pailit	48
5. Mekanisme permohonan pailit	48
B. Tinjauan Umum Tentang Kurator	70
1. Pengangkatan, penggantian dan pemberhentian Kurator	70
2. Tugas, kewenangan, dan tanggung jawab Kurator	72
a. Tugas Kurator	72
b. Wewenang kurator	73
c. Tanggung jawab Kurator	74
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	115
A. Tugas Kurator mengimplementasikan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 Dalam Mengakomodasi Dan Memberikan Perlindungan Hak Pekerja Ketika Perusahaan Mengalami Keadaan Pailit.....	115
1. Tugas kurator berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004	115
2. Kasus Kepailitan PT. Integra Lestari.....	95

B. Upaya dan Tanggung Jawab Kurator melaksanakan hak-hak Pekerja/karyawan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013	104
1. Prinsip Tanggung Jawab dalam hukum.....	109
2. Tanggung jawab Kurator	158
C. Kendala yang dihadapi Kurator dalam mengakomodasi hak-hak buruh setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 dan upaya mengatasi kendala tersebut.....	115
BAB IV PENUTUP	121
A. Simpulan.....	121
B. Saran	123
DAFTAR PUSTAKA	125

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tenaga kerja atau karyawan merupakan salah satu instrumen dalam pembangunan nasional. Tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai salah satu komponen pelaku untuk mencapai tujuan pembangunan itu. Oleh karenanya diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Dalam hal perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/karyawan perusahaan dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa salah satu tujuan utama Negara Indonesia adalah menciptakan suatu kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil dan sejahtera demi mewujudkan suatu keadilan sosial, dengan cara pemenuhan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian dalam Pasal 28D UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Dari kondisi tersebut dapat dipahami bahwa tenaga kerja atau karyawan merupakan salah satu instrumen dalam pembangunan nasional. Tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai salah satu komponen pelaku untuk mencapai tujuan pembangunan itu. Dengan demikian perlu adanya perlindungan terhadap hak-hak Tenaga Kerja.

Kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga karena tidak dapat membayar utangnya.¹

Dalam UU Kepailitan, yang mengatur tentang ketentuan debitor, termasuk sebuah perseroan dikatakan bermasalah dapat disimpulkan dari ketentuan kepailitan yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) UU No 37 Tahun 2004 yang menyatakan *“debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya”*.

Menyadari bahwa kepailitan ataupun pembubaran suatu perusahaan akan berdampak buruk terhadap perlindungan hak dan masa depan dari para karyawannya, maka kepentingan karyawan dalam suatu perusahaan yang dinyatakan pailit itu, adalah berkaitan dengan pembayaran upah dan pesangonnya.

Penuntutan hak dasar bagi pekerja akibat terjadinya kepailitan perusahaan adalah suatu yang mutlak harus dilakukan dalam rangka pemenuhan hak-haknya. Namun dalam kenyataannya banyak menemui berbagai masalah yang kemudian

¹ J. Djohansyah, tanpa tahun terbit, *Pengadilan Niaga dalam Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (tanpa penerbit, tanpa tempat terbit), hlm. 23

menjadi hambatan, baik itu hambatan struktural, kultural, substansi peraturan perundang- undangan atau kebijakan, maupun hambatan finansial.²

Pemenuhan hak dasar pekerja yang tidak dipenuhi oleh pengusaha inilah yang seringkali menimbulkan kasus ketenagakerjaan dewasa ini. Terutama yang terjadi pada saat perusahaan mengalami persoalan finansial baik pra (sebelum) atau pasca (setelah) putusan pailit dijatuhkan oleh pengadilan niaga, yang menyebabkan debitur (pengusaha) menjadi kesulitan memenuhi hak-hak dasar (upah) pekerja/buruh karena tidak berhak dan berwenang lagi untuk mengurus harta kekayaannya yang telah berada di bawah sitaan umum untuk selanjutnya harta kekayaan debitur tersebut akan diurus oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

Apabila perusahaan tempat bekerja pekerja/buruh dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, maka dalam putusannya Pengadilan Niaga harus mengangkat seorang hakim pengawas dan kurator. Pada proses kepailitan maka setelah jatuhnya putusan kepailitan ada dua organ yang sangat berperan aktif dalam pelaksanaannya, yaitu hakim pengawas yang bertugas mengawasi pengurusan dan pemberesan, kemudian kurator yang bertugas melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Hal ini dikarenakan setelah dinyatakan pailit, debitur pailit menurut hukum sudah tidak memiliki kemampuan untuk mengelola harta kekayaannya, sehingga ditunjuklah seorang kurator untuk mengelola, mengurus dan melakukan pemberesan terhadap harta pailit tersebut. Kurator sejak ditunjuk berdasarkan putusan pengadilan wajib mengamankan budel pailit sehingga nantinya dapat

² Agusmidah, *Dinamika dan Kajian Teori Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 65

dilaksanakan pemberesan dan pelunasan terhadap tagihan kreditor yang telah diakui dan dicocokkan piutangnya.

Penyelesaian pemberesan atas harta pailit merupakan salah satu acara dalam kepailitan yang melibatkan kurator untuk melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit. Pelaksanaan tugas kurator harus dilakukan oleh seorang yang profesional dan mengerti segala seluk beluk serta mekanisme yang diatur dalam undang-undang. Kurator dalam menjalankan tugas kepengurusannya terhadap harta pailit, bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaiannya yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit dan segala tindakannya yang berkaitan dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit, kemudian secara berkala kurator harus menyampaikan laporan kepada hakim pengawas.

Berdasarkan ketentuan UU ketenagakerjaan Pasal 95 ayat (4) UU No 13 tahun 2003 dinyatakan bahwa:

“Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang harus didahulukan pembayarannya.”

KUHPerdata telah secara jelas mendeskripsikan mengenai pengertian utang, bahwa utang pada hakikatnya merupakan kewajiban yang timbul dari perikatan dimana ada satu pihak yang berhak atas prestasi (kreditur) dan di sisi lain ada pihak yang berkewajiban memenuhi prestasi (debitur) atas suatu prestasi tertentu. Dengan kerangka demikian, maka utang yang menjadi dasar permohonan pailit termasuk utang yang timbul di luar kerangka perjanjian pinjam meminjam uang, misalnya

perjanjian jual beli, perjanjian pemborongan, perjanjian sewa menyewa, dan termasuk juga perjanjian kerja.³

Pasal 39 ayat (2) UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juga dengan tegas menyatakan bahwa sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, upah yang terutang sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit. Hal ini memperkuat kedudukan upah pekerja/karyawan perusahaan dalam hal terjadi kepailitan merupakan utang harta pailit yang harus dibayarkan.

Berdasarkan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karyawan sering kali ditempatkan paling belakang di dalam antrian kreditor saat harta pailit dibagikan oleh kurator. Hal itu terjadi karena UU Kepailitan, UU Hak Tanggungan dan KUH Perdata memang lebih menempatkan keistimewaan kreditor lain seperti utang negara dan pemegang hak tanggungan, lebih tinggi kedudukannya dibanding karyawan.

UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, juga tidak secara khusus mengatur kedudukan karyawan sebagai kreditor preferen. Namun, pada praktiknya hak-hak karyawan sering kali kurang terlindungi dalam proses kepailitan. Artinya posisi preferen (didahulukan) yang dimiliki oleh karyawan tidak dapat begitu saja didahului.

Posisi didahulukan yang dimiliki oleh pekerja/buruh dalam Undang- Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 tidak dapat begitu saja didahulukan ketika perusahaan dinyatakan pailit. Pada daftar antrian kreditor, pekerja/buruh tidak

³ ibid halaman 129.

berada di urutan pertama. Undang-Undang Ketenagakerjaan memang sudah menyebut pembayaran upah pekerja/buruh didahulukan, tetapi di dalam kepailitan kurator lazim mengesampingkan kepentingan pekerja/buruh. Faktanya, meskipun pekerja berada dalam posisi didahulukan berdasarkan Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, namun pekerja sering kali ditempatkan paling belakang di dalam antrian kreditor saat harta pailit dibagikan oleh kurator.

Hal itu terjadi karena Undang-Undang Kepailitan, Undang-Undang Pajak, Undang-Undang Hak Tanggungan, KUHPerdara memang lebih menempatkan kreditor lain, seperti utang negara dan pemegang hak tanggungan, lebih tinggi kedudukannya dibanding pekerja. Sehingga tidak heran jika berdasarkan UU Ketenagakerjaan, seorang pekerja/buruh yang putus hubungan kerjanya karena perusahaannya dinyatakan pailit, seharusnya bisa mendapatkan kompensasi PHK sekian juta rupiah, namun setelah kurator membagi-bagi harta pailit, pekerja/buruh bersangkutan hanya mendapatkan uang sekian puluh ribu rupiah saja dan yang lebih parahnya lagi, pekerja/buruh tersebut tidak mendapatkan apapun.

Putusan Mahkamah Konstitusi berhasil memberi kepastian dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yaitu dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013, tanggal 11 September 2014. Pemohon yaitu Pekerja PT. Pertamina di dalam uji materi itu memohon supaya MK memberi penafsiran terhadap frasa '*didahulukan pembayarannya.*' Frasa dimaksud terdapat dalam Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan.

MK mengabulkan permohonan itu dengan membuat dua norma baru. Kalau perusahaan diputus pailit, MK mengatakan: (a) Upah pekerja didahulukan pembayarannya dari segala jenis tagihan dan kreditur-kreditur lainnya, termasuk dari kreditur separatis dan tagihan pajak negara. (b) Hak-hak pekerja lainnya

dibayar lebih dahulu dari segala macam tagihan dan kreditur-kreditur lainnya, kecuali jika debitor memiliki kreditur separatis. MK memberi kedudukan berbeda terhadap upah dan hak-hak pekerja lainnya. Upah ditempatkan pada posisi lebih utama dari pada *hak-hak lainnya*.⁴

Kemudian Amar putusan MK No. 67/PUU-XI/2013, tanggal 11 September 2014, sebagai berikut :

“Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai: *”pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis”*;

Berdasarkan putusan MK tersebut, ternyata masih belum jelas apa yang dimaksud dengan “upah dan hak-hak pekerja/buruh lainnya”. Definisi upah bisa ditemukan di dalam Pasal 1 butir 30 UU Ketenagakerjaan. Tetapi, Undang- Undang Ketenagakerjaan tidak mengatur definisi dari hak-hak lainnya pekerja sebagaimana yang telah ada dalam Putusan MK tersebut di atas. Memperhatikan definisi upah, kita dapat mengetahui bahwa upah adalah pemberian imbalan dari pengusaha kepada pekerja yang telah atau akan melakukan pekerjaan yang pembayarannya

⁴ HukumOnline.com. *MK pastikan hak pekerja dalam kepailitan*, Diakses dari internet <http://www.hukumonline.com>, pada tanggal 6 September 2017, pukul 13.00 WIB

dilakukan secara rutin yang di dalamnya meliputi tunjangan bagi pekerja dan keluarganya.

Upah di dalam praktik hubungan kerja dikelompokkan ke dalam tiga komponen, yaitu upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap. Tunjangan tetap adalah tunjangan tambahan yang tidak terkait dengan gaji pokok yang dibayar perusahaan secara rutin kepada pekerja yang pembayarannya tidak dipengaruhi oleh syarat kehadiran bekerja. Sedangkan tunjangan tidak tetap merupakan penerimaan pekerja dari perusahaan yang nilai dan pembayarannya dipengaruhi oleh syarat tertentu, seperti kehadiran. Yang lazim ditetapkan sebagai tunjangan tidak tetap, misalnya tunjangan kehadiran, tunjangan makan, tunjangan transport.

Undang- Undang Ketenagakerjaan tidak mengenal definisi hak-hak lainnya. Untuk mengetahui apa saja yang disebut hak-hak lainnya dari pekerja/karyawan, harus dikorelasikan dengan pemutusan hubungan kerja (PHK). Ketika perusahaan diputus pailit, peristiwa yang lazim terjadi adalah PHK. Pekerja yang di PHK bukan karena melakukan kesalahan, sesuai UU Ketenagakerjaan, berhak memperoleh uang pesangon. Ketika pekerja di PHK, baik karena alasan pailit maupun alasan lainnya, uang pesangon dihitung secara normatif, berpedoman pada masa kerja, upah pokok, dan tunjangan tetap.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, pembayaran upah pekerja didahulukan dari tagihan pajak dan kreditur lainnya, Mahkamah Konstitusi memberi alasan bahwa upah pekerja yang belum dibayar debitor sebelum diputus pailit, merupakan hak dasar pekerja yang tidak boleh hapus maupun dikurangi. Sebaliknya, kalau pekerja memiliki hak-hak lainnya, seperti uang pesangon,

bertolak dari putusan Mahkamah Konstitusi di atas, kurator dapat membayar pesangon setelah melunasi tagihan kreditur separatis. Terkait pembayaran uang pesangon, Mahkamah Konstitusi tidak mengubah posisi pekerja. MK memposisikan pekerja tetap sebagai kreditur preferen. Sedangkan terkait pembayaran upah, Mahkamah Konstitusi memposisikan pekerja sebagai kreditur paling utama dari kreditur-kreditur lainnya.

Dampak positif putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap pekerja yaitu pembayaran tagihan negara dan kreditur separatis tidak lagi yang utama ketika pekerja mengajukan tagihan pembayaran upah. Mahkamah Konstitusi memposisikan pembayaran upah pekerja lebih utama dari semua jenis tagihan. Posisi upah mengalahkan tagihan negara dan kreditur separatis.

Masalah yang timbul kemudian adalah kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja akibat kepailitan. Mahkamah Konstitusi mengatakan pembayaran hak pekerja lainnya seperti uang pesangon diutamakan dari tagihan lainnya, tetapi dibelakangkan dari tagihan kreditur separatis. Karena itu, kurator dapat membayar uang pesangon sebagai yang pertama, kalau debitor tidak mengikatkan diri dengan kreditur separatis.

Permasalahan lain, kalau upah pekerja harus dibayar sejak debitor diputus pailit, sedangkan operasional debitor berhenti akibat pailit, sulit memastikan, apakah kurator berani membayar upah pekerja selama proses kepailitan. Kendala mendapatkan upah selama proses pemberesan kepailitan semakin terbuka ketika harta pailit tidak sebanding dengan utang debitor. Kurator bisa berdalih bahwa pekerja dan debitor tidak menjalankan kewajiban selama proses kepailitan bukan

atas kehendak kedua belah pihak, tetapi karena vonis pailit pengadilan. Karena itu, kalau pekerja menuntut upah pasca putusan pailit, maka upah selama pemberesan kepailitan akan terbentur dengan asas no work no pay. Pembayaran seluruh upah dalam proses pailit mungkin bisa dilaksanakan kalau harta pailit cukup untuk menalangi. Uraian ini memperlihatkan bahwa status hukum upah yang tertunggak tidak sama dengan upah selama proses (pemberesan) kepailitan.

Jika membandingkan waktu timbulnya antara upah yang tertunggak dengan upah pasca putusan pailit, tuntutan pembayaran upah yang tertunggak tampak lebih realistis. Sebab tunggakan upah masuk dalam kualifikasi utang yang timbul sebelum kepailitan terjadi. Kalau pekerja mengajukan tuntutan upah pasca putusan pailit, sedangkan operasional perusahaan sudah berhenti, maka berdasarkan Pasal 29 UU Kepailitan dan PKPU menyatakan sebagai berikut :

“Suatu tuntutan hukum di Pengadilan yang diajukan terhadap Debitor sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkan putusan pernyataan pailit terhadap Debitor.”

Menurut ketentuan tersebut di atas, maka tuntutan hukum kepada debitor tidak dapat diajukan setelah putusan pailit ditetapkan.

Salah satu bagian terpenting dalam penyelesaian perkara kepailitan adalah kurator. Kurator dalam menjalankan tugas harus memahami bahwa tugasnya tidak sekedar menyelamatkan harta pailit yang berhasil dikumpulkannya untuk kemudian dibagikan kepada para kreditor tapi sedapat mungkin bisa meningkatkan nilai harta pailit debitor. Lebih jauh lagi kurator juga dituntut untuk memiliki integritas yang berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta keharusan untuk menaati standar

profesi dan etika. Keharusan ini bertujuan menghindari adanya benturan kepentingan dengan debitor ataupun kreditor.

Berangkat dari adanya latar belakang fenomena yang terjadi mengenai polemik pemenuhan hak-hak pekerja yang harus diperhatikan oleh kurator saat terjadi kepailitan perusahaan, serta belum jelasnya tentang “hak-hak lain pekerja” saat terjadi kepailitan pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013.”, maka sangat menarik untuk diteliti lebih mendalam. Oleh karena itu, penulis menguraikan permasalahan ini sebagai pokok bahasan penulisan thesis dengan judul: **“UPAYA HUKUM KURATOR UNTUK MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK KARYAWAN PADA PERUSAHAAN YANG DIPUTUS PAILIT SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 67/PUU-XI/2013.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang penulis sampaikan dalam latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tugas Kurator mengimplementasikan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 dalam mengakomodasi dan memberikan perlindungan hak pekerja ketika perusahaan mengalami keadaan pailit ?
2. Bagaimana upaya dan tanggung jawab kurator melaksanakan hak-hak pekerja setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013?
3. Apa saja kendala yang dihadapi Kurator dalam mengakomodasi hak-hak pekerja setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-

XI/2013 dan bagaimana upaya mengatasi kendala tersebut ?

C. Tujuan Penelitian :

Adapun yang menjadi tujuan dari Penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa tugas Kurator mengimplementasikan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 dalam mengakomodasi dan memberikan perlindungan hak pekerja ketika perusahaan mengalami keadaan pailit.
2. Untuk menganalisa upaya dan tanggung jawab kurator melaksanakan hak-hak pekerja setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013.
3. Untuk menganalisa kendala yang dihadapi Kurator dalam mengakomodasi hak-hak pekerja setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 dan bagaimana upaya mengatasi kendala tersebut.

D. Manfaat Penelitian.

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis.

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas tentang pengetahuan hak dan kewajiban yang terkait dengan bidang usaha dan ketenagakerjaan ketika terjadi sebuah peristiwa hukum (kepailitan pada perusahaan).

2. Manfaat Secara Praktis.

Memberikan masukan bagi Pemerintah, pengusaha, karyawan Perusahaan serta Kurator dalam mengakomodasi dan memberikan perlindungan hak pekerja ketika perusahaan mengalami keadaan pailit dengan tetap menjunjung tinggi penegakan hukum ketenagakerjaan.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian hukum, adanya kerangka konseptual dan landasan atau kerangka teoritis menjadi syarat yang penting. Dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum, dan di dalam landasan/ kerangka teoritis diuraikan segala sesuatu yang terdapat dalam teori sebagai suatu system aneka “theore’ma” atau ajaran.⁵

Kerangka teori adalah merupakan kerangka berfikir lebih lanjut terhadap masalah- masalah yang diteliti. Sebelum peneliti mengetahui kegunaan dari kerangka teori, maka peneliti perlu mengetahui terlebih dahulu mengenai arti teori. Menurut Bintoro Tjokroamidjojo dan Mustofa Adidjoyo “teori” diartikan sebagai ungkapan mengenai hubungan kausal yang logis diantara perubahan (variabel) dalam bidang tertentu, sehingga dapat digunakan sebagai kerangka fikir (*frame of thinking*) dalam memahami serta menangani permasalahan yang timbul di dalam bidang tertentu.⁶

⁵ Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Ed. 1, Cet. 7, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 6

⁶ Bintoro Tjokroamidjojo dan Mustofa Adidjoyo, *Teori dan Strategi Pembangunan Nasional*, (Jakarta, CV. Haji Mas Agung, 1988), hlm. 12

Dari teori di atas dapat disimpulkan bahwa maksud kerangka teori adalah pengetahuan yang diperoleh dari tulisan dan dokumen serta pengetahuan kita sendiri yang merupakan kerangka dari pemikiran dan sebagai lanjutan dari teori yang bersangkutan, sehingga teori penelitian dapat digunakan untuk proses penyusunan maupun penjelasan serta meramalkan kemungkinan adanya gejala-gejala yang timbul.

1. Kerangka Konsepsional

Dalam penelitian ini, digunakan beberapa istilah sebagai landasan konsepsional untuk menghindari perbedaan pemahaman mengenai definisi atau pengertian serta istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Perlindungan Hukum

Konsep hukum sangat dibutuhkan apabila kita mempelajari hukum. Konsep hukum pada dasarnya adalah batasan tentang suatu istilah tertentu. Tiap istilah ditetapkan arti dan batasan maknanya setajam dan sejelas mungkin yang dirumuskan dalam suatu definisi dan digunakan secara konsisten. Konsep yuridis (legal concept) yaitu konsep konstruktif dan sistematis yang digunakan untuk memahami suatu aturan hukum atau sistem aturan hukum.⁷

⁷ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, 2009), hlm. 3

Menurut Harjono,⁸ Para pengkaji hukum belum secara komprehensif mengembangkan konsep “perlindungan hukum” dari perspektif keilmuan hukum. Banyak tulisan-tulisan yang dimaksudkan sebagai karya ilmiah ilmu hukum baik dalam tingkatan skripsi, tesis, maupun disertasi yang mempunyai tema pokok bahasan tentang “perlindungan hukum”. Namun tidak secara spesifik mendasarkan pada konsep-konsep dasar keilmuan hukum secara cukup dalam mengembangkan konsep perlindungan hukum. Bahkan dalam banyak bahan pustaka, makna dan batasan-batasan mengenai “perlindungan hukum” sulit ditemukan, hal ini mungkin didasari pemikiran bahwa orang telah dianggap tahu secara umum apa yang dimaksud dengan perlindungan hukum sehingga tidak diperlukan lagi sebuah konsep tentang apa yang dimaksud “Perlindungan Hukum”. Konsekwensi dari tidak adanya konsep tersebut akhirnya menimbulkan keragaman dalam pemberian maknanya, padahal perlindungan hukum selalu menjadi tema pokok dalam setiap kajian hukum.

Padanan kata perlindungan hukum dalam bahasa Inggris adalah “legal protection”, dalam bahasa Belanda “rechtsbecherming”. Kedua istilah tersebut juga mengandung konsep atau pengertian hukum yang berbeda untuk memberi makna sesungguhnya dari “perlindungan hukum”. Di tengah langkanya makna perlindungan hukum itu, kemudian Harjono berusaha membangun sebuah konsep perlindungan hukum dari perspektif keilmuan hukum, menurutnya:

⁸ Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, (Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), hlm.373.

“perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum”.⁹

Dari batasan tersebut jelaslah bahwa konsep-konsep umum dari perlindungan hukum adalah perlindungan dan hukum. “Perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata, yaitu “Perlindungan” dan “Hukum”, artinya perlindungan menurut hukum dan undang-undang yang berlaku”. Konsep tentang perlindungan hukum terhadap pekerja yang dipergunakan adalah perlindungan terhadap hak pekerja dengan menggunakan sarana hukum. Atau perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap pekerja/buruh pada saat perusahaan mengalami kepailitan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013.

b. Pekerja/buruh/karyawan

“Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”. “Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain”.

c. Perusahaan

Perusahaan adalah:

- 1) Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;

⁹ Ibid. hlm. 357.

- 2) Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

d. Hak- hak Pekerja

Hak- Hak Pekerja sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Adapun hak-hak pekerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Tenaga kerja idealnya memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan (Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 6).
- 2) Terkait dengan pembekalan, pelatihan, dan bentuk kegiatan lain dalam rangka meningkatkan keterampilan (kompetensi) untuk menunjang bidang kerjanya, pekerja/buruh berhak untuk memperoleh pelatihan (Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 11, 18 Ayat (1), 23).
- 3) Tenaga kerja juga memiliki kebebasan untuk pindah pekerjaan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya (Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 31).
- 4) Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat karena melahirkan atau keguguran (miscarried) (Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 82).
- 5) Pekerja/buruh mempunyai hak terhadap keselamatan dan kesehatan kerja (Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 86).
- 6) Pekerja/buruh berhak terhadap penghasilan yang layak (Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 88).

7) Pekerja/buruh dan keluarganya di jamin dengan jaminan sosial tenaga kerja (Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 99) .

e. Kepailitan

Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diberikan definisi “Kepailitan” sebagai berikut. “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas¹⁰ .

Berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menyatakan, *“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditornya”*.

f. Kurator

Kurator dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini.

g. Kreditor

¹⁰ Jono. *Hukum Kepailitan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hlm. 2

Kreditor dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah baik Kreditor Konkuren, Kreditor Separatis, maupun Kreditor Preferen.

Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya atau kreditor dengan jaminan, disebut *kreditor separatis*. Berdasarkan pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kreditor tersebut berwenang untuk mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. *Separatis* berarti terpisahnya hak eksekusi atas benda-benda yang dijamin dari harta yang dimiliki debitor yang dipailitkan. Sehingga, kreditor separatis mendapatkan posisi paling utama dalam proses kepailitan, sehubungan dengan hak atas kebendaan yang dijamin untuk piutangnya.¹¹

Kreditor preferen berarti kreditor yang memiliki *hak istimewa* atau *hak prioritas*. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memakai istilah hak-hak istimewa, sebagaimana diatur di dalam KUHPerdara. Hak istimewa mengandung arti hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya. Terdapat dua jenis hak istimewa yang diatur dalam KUHPerdara, yaitu hak istimewa khusus (pasal 1139 KUHPerdara) dan hak istimewa

¹¹ HukumOnline.com. *Pembayaran Upah Buruh dalam Proses Kepailitan*. Diakses dari internet <http://www.hukumonline.com>, pada tanggal 6 September 2017, pukul 13.00 WIB

umum (pasal 1149 KUHPerdato). Hak istimewa khusus berarti hak istimewa yang menyangkut benda-benda tertentu, sedangkan yang termasuk hak istimewa umum adalah seluruh benda. Berdasarkan ketentuan KUHPerdato, hak istimewa khusus didahulukan atas hak istimewa umum (pasal 1138 KUHPerdato). Meskipun memiliki keistimewaan dibanding hak-hak yang dimiliki orang berpiutang pada umumnya, posisi pemegang hak istimewa pada dasarnya masih berada di bawah pemegang hak gadai atau hipotek sehubungan dengan benda-benda yang dijamin. Ada beberapa pengecualian untuk urutan tersebut, seperti misalnya, biaya-biaya perkara atau tagihan pajak.¹²

Kreditor konkuren atau *kreditor biasa* adalah kreditor pada umumnya (tanpa hak jaminan kebendaan atau hak istimewa). Berdasarkan KUHPerdato, kreditor konkuren memiliki kedudukan yang setara dan memiliki hak yang seimbang (proporsional) atas piutang-piutang mereka. Ketentuan tersebut juga dinamakan prinsip *paritas creditorum*.¹³

Menurut Rahayu Hartini, terdapat 3 (tiga) golongan Kreditor, yaitu :¹⁴

- 1) *Golongan Khusus*, yaitu kreditor yang mempunyai hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan (pasal 56 UU Kepailitan). Pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) yang melaksanakan haknya tersebut, wajib memberikan pertanggungjawaban kepada kurator tentang hasil penjualan barang yang menjadi agunan dan menyerahkannya kepada kurator sisanya

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid*

¹⁴ Rahayu Hartini.. *Hukum Kepailitan* (Malang: UMM Press, 2012) hlm. 139

setelah dikurangi jumlah utang, bunga dan biaya.

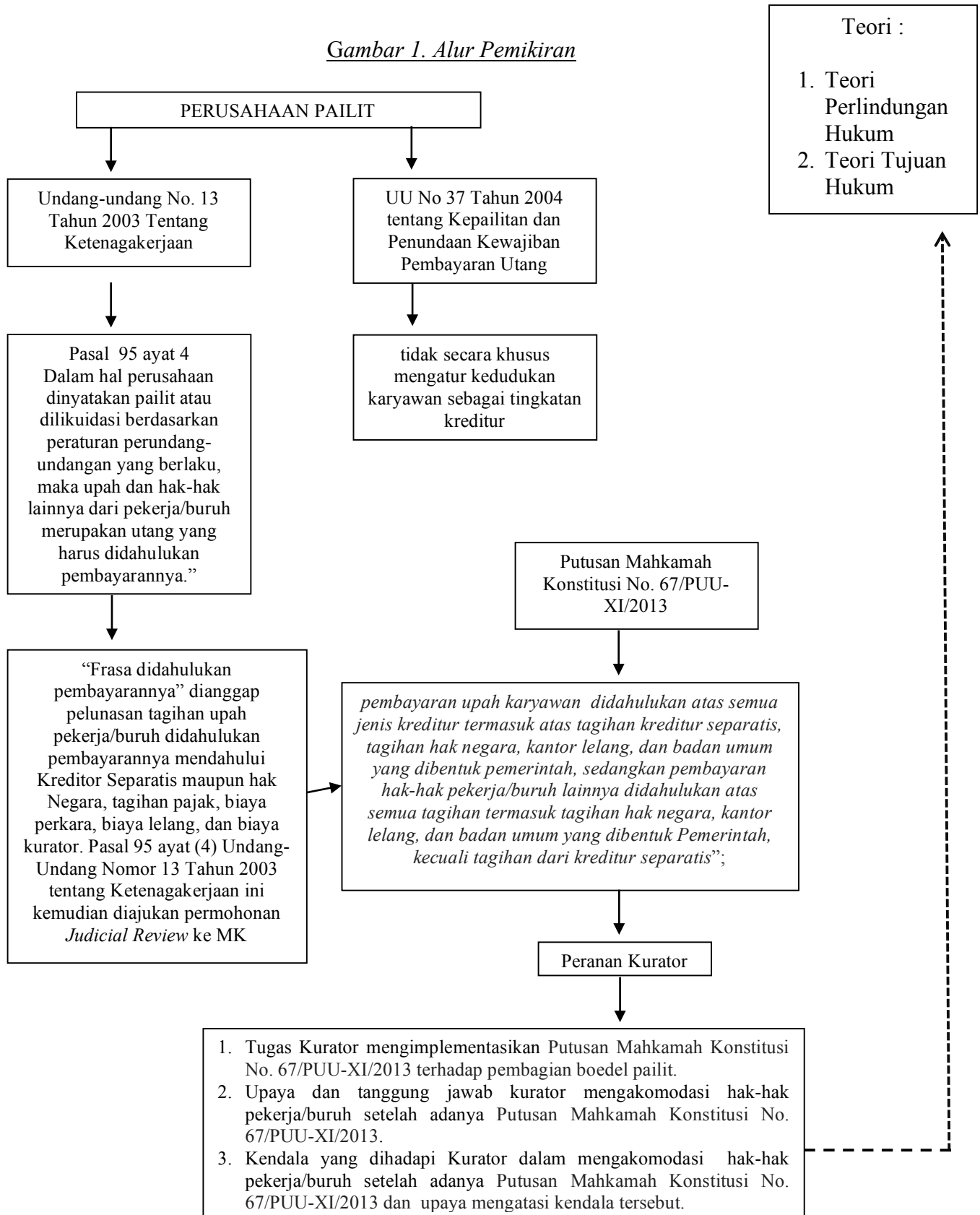
- 2) *Golongan Istimewa (previlege)*, yaitu kreditor yang piutangnya mempunyai kedudukan istimewa artinya golongan kreditor yang mempunyai hak untuk pelunasan terlebih dahulu atas hasil penjualan harta pailit (pasal 1133, 1134, 1139, 1149 KUHPerdara).
- 3) *Golongan Konkuren*, atau kreditor konkuren yaitu kreditor-kreditor yang tidak termasuk golongan khusus atau golongan istimewa. Pelunasan piutang-piutang mereka dicukupkan dengan sisa hasil penjualan atau pelelangan harta pailit sesudah diambil bagian golongan khusus dan golongan istimewa, sisa penjualan harta pailit itu dibagi menurut imbalan besar kecilnya piutang para kreditor konkuren itu (pasal 1132 KUHPerdara).

Pekerja/buruh dalam kepailitan termasuk dalam golongan istimewa, yang mana tagihan upahnya dikategorikan sebagai hak istimewa umum, sesuai pasal 1149 angka (4) KUHPerdara. Walaupun memiliki hak untuk pelunasan terlebih dahulu atas penjualan harta pailit, posisi pemegang hak istimewa masih berada di bawah pemegang hak jaminan. Bahkan diantara kreditor pemegang hak istimewa, pekerja/buruh berada di peringkat kelima setelah tagihan pajak, biaya perkara, biaya lelang, dan biaya kurator.¹⁵

¹⁵ Susilo Andi Darma.. *Kedudukan Pekerja/Buruh dalam Perkara Kepailitan Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan dan Teori Keadilan*. 2013 halaman 132. <http://www.aifis-digilib.org>, pada tanggal 6 September 2017, pukul 13.00 WIB

2. Kerangka Pikir

Gambar 1. Alur Pemikiran



3. Kerangka Teoritis

Kerangka Teori pada suatu penelitian mempunyai beberapa yang mencakup hal-hal kegunaan sebagai berikut:¹⁶

- a. Berguna untuk mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diuji kebenarannya.
- b. Sangat berguna dalam mengembangkan sistim klasifikasi fakta dan membina struktur konsep-konsep, serta memperkembangkan definisi-definisi baru.
- c. Teori merupakan suatu ikhtisar daripada hal-hal yang telah diketahui, yang kemudian diuji kebenarannya yang menyangkut obyek yang diteliti.
- d. Memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karna itu telah diketahui penyebab fakta itu terjadi dan kemungkinan besar faktor tersebut akan timbul lagi dimasa mendatang
- e. Memberikan petunjuk terhadap kekurangan pada pengetahuan peneliti, walaupun di dalam kenyataannya tidak jarang terjadi peneliti merasa dirinya cukup berkompeten untuk melakukan penelitian.

Kerangka teoritis dalam penulisan tesis hukum mempunyai 4 (empat) ciri, yaitu:¹⁷

- a. Teori-teori hukum
- b. Asas-asas hukum

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007). hlm. 121.

¹⁷ Gunarto, *Metode Penelitian Hukum: Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Materi Mata Kuliah Metode Penelitian Hukum, 2012 <http://profgunarto.files.wordpress.com/2012/12/mpm-2.pdf>

- c. Doktrin hukum
- d. Ulasan pakar hukum berdasarkan pembedangannya

Perkembangan ilmu hukum tidak terlepas dari teori hukum sebagai landasannya, dan tugas teori hukum adalah untuk menjelaskan nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam.¹⁸ Bruggink memberikan penjelasan mengenai teori hukum dalam dua hal:¹⁹ Pertama, teori hukum dalam arti luas, dapat diartikan sebagai kajian dari ilmu hukum itu sendiri; Kedua, teori hukum dalam arti sempit, yakni merupakan keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan pengadilan. Teori ini berbicara secara spesifik mengenai hal-hal yang berkaitan dengan konsepsi-konsepsi hukum, prinsip-prinsip hukum, doktrin-doktrin hukum, dan kaidah-kaidah hukum.

Dalam penelitian ini kerangka teoritik yang digunakan penulis berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak karyawan pada perusahaan yang diputus pailit setelah putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013. Berikut beberapa teori yang penulis gunakan, yakni teori perlindungan hukum, dan teori tujuan hukum.

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon²⁰, bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif

¹⁸ Lawrence M. Friedman dalam Esmi Warasih, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: PT. Suryandaru Utama, 2005), hlm. 30.

¹⁹ Bruggink dalam Gunarto, Op.cit., <http://profgunarto.files.wordpress.com/2012/12/mph-2.pdf>

²⁰ Phillipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987. hlm. 2.

dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Perlindungan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya aturan-aturan hukum secara nyata

Perlindungan hukum bagi masyarakat adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat yang berdasarkan kepada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat (di Indonesia), landasan pijak adalah Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah negara. Menurut Satjipto Raharjo²¹, perlindungan hukum memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Perlindungan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya aturan-aturan hukum secara nyata. Ditinjau dari sudut subyeknya, perlindungan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang lebih luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum, yang melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum.

²¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2000. hlm. 54.

Dalam arti sempit, dari segi subyeknya, perlindungan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan perlindungan hukum, apabila diperlukan penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.²²

Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat bersumber pada konsep-konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan konsep-konsep *rechthtsstaat* dan *the rule of law*. Konsep pengakuan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia memberikan isinya, sedangkan *rechthtsstaat* dan *the rule of law* menciptakan sarananya, dengan demikian pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia akan tumbuh subur dalam wadah “rechtsstaat” dan “the rule of law”.²³

2. Teori Tujuan Hukum

Pada dasarnya hukum diciptakan untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Jadi tujuan diciptakannya hukum adalah untuk kepentingan kehidupan masyarakat agar lebih tertib, teratur, damai dan sejahtera. Pemikiran tujuan hukum seperti itu telah dimulai sejak zaman Yunani hingga sekarang ini.

Pemikir Yunani yang untuk pertama kalinya bicara masalah tujuan hukum adalah Aristoteles. Filsuf ini melihat realita bahwa secara alamiah manusia adalah binatang politik (*zoon politikon*) atau makhluk

²² Apeldoorn.L.J.Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, 1993. hlm. 6.

²³ Satjipto Rahardjo, *Op-Cit.*, hlm. 20.

bermasyarakat. Dimana tujuan hukum adalah untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.²⁴

Tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup secara damai, dimana hukum menghendaki perdamaian dan keseimbangan. Dengan terciptanya perdamaian di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi.²⁵

Tentang tujuan hukum, terdapat beberapa pendapat sarjana yang patut untuk dikemukakan yaitu :

- a. Prof. L.J. van Apeldorn menyatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Dimana hukum diharap mampu menjaga dan mempertahankan kepentingan, baik yang menyangkut harta benda, kehormatan, jiwa maupun kemerdekaan secara adil bagi tiap- tiap orang dalam masyarakat. Keadilan yang dijaga hukum adalah keadilan yang sesuai dengan porsi seseorang (proporsional).
- b. Prof. Soebekti menjelaskan bahwa tujuan hukum adalah melayani kehendak negara yakni mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. Dalam melayani tujuan negara, hukum akan memberikan 'keadilan' dan 'ketertiban' bagi masyarakat.
- c. Prof. van Kant, menurutnya tujuan hukum adalah menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009. hlm. 107-108.

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 2007. hlm. 77.

kepentingannya tidak dapat diganggu. Dengan tujuan ini, akan dicegah terjadinya perilaku main hakim sendiri (*eigenrichting*) terhadap orang lain, karena tindakan itu dicegah oleh hukum.

d. Prof. Mochtar Kusumaadmadja menjelaskan bahwa tujuan hukum untuk menjaga ketertiban. Ketertiban ini merupakan hal yang pokok (*fundamental*) bagi pembentukan masyarakat yang teratur aman dan tertib, dimana tujuan hukum untuk keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat pada zamannya.²⁶

e. Dr. O. Notohamidjojo. S.H. menjelaskan Tujuan hukum untuk mendatangkan tata dan damai dalam masyarakat, menjaga supaya manusia diperlakukan sebagai manusia, memanusiaka manusia dalam segala hakekat dan relasinya merupakan tujuan yang terakhir dan yang paling mulia bagi hukum. 4 norma penting dalam menggembalakan hukum, yakni:

1) Kemanusiaan : menuntut manusia diperlakukan sebagai manusia.

2) Keadilan : keadilan adalah kehendak ajeg dan kekal untuk memberikan kepada orang lain apa saja yang menajdi haknya (*ulpianus*).

3) Kepatutan hal wajib dipelihara dalam pemberlakuan Undang-Undang dengan maksud untuk menghilangkan

²⁶ Wasis, SP, *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2002. hlm. 22.

ketajamannya, guna pergaulan hidup manusia.

- 4) Kejujuran : yurist memelihara kejujuran dalam dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan curang dalam mengurus perkara.²⁷

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang tujuan hukum, terdapat teori yang menjelaskan segi-segi penting diperlukannya hukum bagi komunitas kehidupan masyarakat. Teori-teori tersebut adalah :

a. Teori Etis

Menurut teori etis hukum semata-mata bertujuan keadilan. Tujuan hukum ditentukan oleh unsur keyakinan seseorang yang dinilai etis. Adil atau tidak adil, benar atau tidak benar yang berada pada sisi batin seseorang, menjadi tumpuan dari teori ini. Kesadaran etis yang berada pada tiap-tiap batin orang menjadi ukuran untuk menentukan warna keadilan dan kebenaran. Teori ini di dikembangkan oleh Geny.

b. Teori Utilitas

Teori ini dikembangkan oleh Jeremy Bentham. Menurut teori ini, hukum akan memberi jaminan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya (*the gretest good of the greatest number*). Pada hakekatnya menurut teori ini tujuan hukum adalah manfaat dalam

²⁷ C. Maya Indah, Paper, Refleksi Pemikiran O.Notohamidjojo, [http://repository.library.uksw.edu/bitstream//PAPER C.MayaIndahS._Refleksi Pemikiran 0. Notohamidjojo](http://repository.library.uksw.edu/bitstream//PAPER C.MayaIndahS._Refleksi%20Pemikiran%20Notohamidjojo)

menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak dan beorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan daya guna.

Berdasarkan teori diatas perlindungan hukum terhadap Hak Pekerja Pada Perusahaan Yang Diputus Pailit Setelah Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013 sangat diperlukan. Sudah saatnya karyawan yang di phk akibat pailitnya perusahaan dilindungi hak-haknya dan sudah seharusnya negara menjamin dan memberikan perlindungan hukum kepada hak Karyawan Pada Perusahaan Yang Diputus Pailit Setelah Putusan Mk No. 67/PUU-XI/2013.

Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, saat itu juga segala yang berhubungan dengan harta perusahaan akan menjadi tanggung jawab Kurator untuk mengurus harta pailit milik perusahaan tersebut. Sehingga yang bertugas untuk membagi harta debitor pailit kepada para Kreditor menjadi tanggung jawab Kurator.

Pekerja yang di PHK karena perusahaan mengalami kepailitan. Mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi oleh pihak perusahaan. Dalam hal pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh kurator, pemutusan tersebut harus sesuai dengan Pasal 165 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UUTK).²⁸

“Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan pailit dengan ketentuan

²⁸ Jono., Op.cit.,hlm. 119

pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).”

Hal inilah yang kemudian menjadi perdebatan ketika disandingkan dengan Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan *“Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya”*. Kata “didahulukan pembayarannya” dianggap menjadi bermakna multitafsir. “Didahulukan pembayarannya” dianggap pelunasan tagihan upah pekerja/buruh didahulukan pembayarannya mendahului Kreditor Separatis maupun hak Negara, tagihan pajak, biaya perkara, biaya lelang, dan biaya kurator. Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ini kemudian diajukan permohonan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17 Juni 2013 dengan nomor perkara 67/PUU-XI/2013 oleh 9 (sembilan) orang pekerja PT. PERTAMINA sebagai pemohon.

Atas permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, bahwa :

- 1) Pasal 95 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai: pembayaran upah pekerja/buruh yang terutang didahulukan atas semua jenis kreditor

termasuk atas tagihan kreditor separatis, tagihan hak Negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk oleh Pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak Negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk oleh Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditor separatis.

- 2) Pasal 95 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai : pembayaran upah pekerja/buruh yang terutang didahulukan atas semua jenis kreditor termasuk atas tagihan kreditor separatis, tagihan hak Negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk oleh Pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak Negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk oleh Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditor separatis.

Apabila dilihat dari sejarah, filosofi dan asas-asas hukum kepailitan, hukum kepailitan itu sendiri ada karena adanya perjanjian utang piutang antara debitor dan kreditor, dimana penyelesaiannya yang sulit mengakibatkan perlu ada pengaturan penyelesaian pembayaran utang untuk melindungi debitor dan kreditor, oleh karena itu kepailitan menganut beberapa prinsip utama penyelesaian utang debitor terhadap kreditornya secara merata untuk menciptakan keadilan.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data atau bahan yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian hukum dengan metode yang lazim digunakan dalam metode penelitian hukum dengan maksimal untuk mendekati kebenaran yang berlaku umum dengan suatu teknik penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan adalah suatu cara bagaimana memperlakukan pokok permasalahan dalam rangka mencari pemecahan berupa jawaban jawaban dari permasalahan serta tujuan penelitian. Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu menggunakan norma-norma hukum yang bersifat menjelaskan dengan cara meneliti dan membahas peraturan-peraturan hukum yang berlaku saat ini. Penelitian yuridis dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian kepustakaan. Penelitian hukum sosiologis atau empiris dilakukan dengan cara meneliti lapangan yang merupakan data primer.²⁹ Penelitian ini lebih ditekankan pada Peraturan Perundang-Undangan mengenai Upaya Hukum Kurator Untuk Memberikan Perlindungan Hukum Atas Hak Karyawan Pada Perusahaan Yang Diputus Pailit Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/Puu-XI/2013. Untuk melihat bagaimana proses pelaksanaannya serta kendala apa saja yang ada

²⁹ Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 9

melalui suatu penelitian lapangan yang dilakukan dengan pengamatan (observasi) langsung, sehingga diperoleh kejelasan tentang hal yang diteliti

2. Jenis Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya.³⁰ Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.

3. Sumber Data

Adapun sumber dan jenis data yang digunakan adalah :

- a. Data primer, merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber asli (langsung dari informan). Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode wawancara atau Tanya jawab dengan pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Narasumber dalam wawancara adalah Bapak Jamaslin James Purba, S.H., M.H. dan Bapak Imran Nating, S.H., M.H., keduanya selaku Kurator dan juga sebagai Pengurus Asosisasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) yang merupakan Kurator berpengalaman dalam menangani persoalan kepailitan dan pernah beberapa kali menjadi

³⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2000), hlm. 5

Narasumber penelitian skripsi dan tesis mahasiswa lain, mengingat banyaknya kasus tentang kepailitan perusahaan yang pernah ditanganinya maka penulis memilih Bapak Jamaslin James Purba, S.H., M.H. dan Bapak Imran Nating, S.H., M.H., sebagai Narasumber dalam wawancara ini.

b. Data Sekunder , merupakan data yang diperoleh melalui studi pustaka yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang bersumber dari buku literatur dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas. Data Sekunder tersebut diantaranya :

1) Bahan hukum primer, data yang memiliki kekuatan hukum mengikat, yaitu :

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang- undang Hukum Dagang (KUHD)
- c) Kitab Undang- undang Hukum Perdata (KUHPER)
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- e) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- f) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- g) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013.

h) Standar Profesi Kurator dan Pengurus diterbitkan oleh
Asosiasi Kurator & Pengurus Indonesia

- 2) Bahan hukum sekunder, bahan- bahan yang erat kaitannya dan mendukung bahan hukum primer, yaitu buku- buku para sarjana atau pakar hukum, hasil penelitian, opini- opini hukum, jurnal, putusan pengadilan dan lain- lain. Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku atau semua informasi yang relevan dengan permasalahan hukum. Jadi, bahan hukum sekunder adalah hasil kegiatan teoritis akademis yang mengimbangi kegiatan- kegiatan praktik legislative (atau praktik yudisial juga).³¹
- 3) Bahan hukum tersier, Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus, artikel pada majalah atau surat kabar, digunakan untuk melengkapi dan menjelaskan bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi Dokumen, yaitu mengumpulkan dan menganalisis data-data sekunder mengenai objek penelitian.

³¹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum (Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya)*, ELSAM dan HUMA, Jakarta, 2002, hal. 155.

- b. Wawancara, yaitu mengadakan Tanya jawab untuk memperoleh data primer secara langsung dengan responden. Wawancara dilakukan terhadap informan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung yang bersifat terpadu. Sebelum wawancara dilakukan, peneliti mempersiapkan daftar pertanyaan sedemikian rupa sesuai permasalahan yang akan dibahas. Daftar pertanyaan disiapkan secara terbuka, artinya para responden atau informan dapat memberikan jawaban dengan bebas sesuai dengan pendapatnya. Penelitian ini menggunakan informan yaitu Kurator dan Organisasi Kurator yaitu Asosiasi Pengurus Asosiasi Kurator & Pengurus Indonesia (AKPI).

5. Teknik Analisis Data

Data-data yang dikumpulkan dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, diolah dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan akhirnya dianalisis secara kualitatif³², yang artinya prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku. Pola-pola tadi dianalisis dengan menggunakan teori obyektif.

Analisis data dilakukan setelah data terkumpul dan metode analisis data yang digunakan adalah analisa kualitatif yaitu data yang diperoleh,

³² S, Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik* (Bandung: Pustaka Setia, 1998), hlm. 129

dipilih dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mendapatkan data yang diperlukan.

G. Sistematika Penelitian

Lebih terarahnya penulisan tesis memerlukan sistematika yang jelas dan dapat dijadikan pedoman dalam melakukan pembahasan. Berkaitan dengan itu pembahasan tesis ini terdiri dari beberapa bab, antara lain:

Bab I : Bab pendahuluan terdiri dari beberapa sub bab antara lain yang berisikan tentang; latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan metode penelitian.

Bab II : Bab kedua mengkaji lebih mendalam tentang tinjauan pustaka. Adapun kajian pustaka yang disajikan mengenai hukum ketenagakerjaan, hukum kepailitan di Indonesia.

Bab III: Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dibahas sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, antara lain berisikan tentang tugas Kurator dalam mengimplementasikan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 dalam mengakomodasi dan memberikan perlindungan hak pekerja ketika perusahaan mengalami keadaan pailit, menganalisa upaya dan tanggung jawab kurator melaksanakan hak-hak pekerja/buruh dalam melaksanakan hak-hak pekerja setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013, dan mengetahui kendala yang dihadapi Kurator dalam mengakomodasi hak-hak pekerja setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 dan bagaimana upaya mengatasi kendala tersebut

Bab IV: Bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan

1. Pengertian Kepailitan

Pengertian kepailitan menurut Undang-undang No.37 Tahun 2004 Pasal 1 angka 1 adalah “sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”. Pengertian kepailitan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni “keadaan atau kondisi seseorang atau badan hukum yang tidak mampu lagi membayar kewajibannya (dalam hal utang-utangnya) kepada si piutang.”

Pengertian kepailitan menurut Bernadette Waluyo adalah *“eksekusi massal yang ditetapkan dengan keputusan hakim, yang berlaku serta merta, dengan melakukan penyitaan umum atas semua harta orang yang dinyatakan pailit, baik yang ada pada waktu pernyataan pailit, maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung, untuk kepentingan semua kreditor, yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib.”*³³

Dalam Black’s Law Dictionary sebagaimana dikutip oleh Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja bahwa pailit atau “*Bankrupt*” adalah *“the state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due”*. The

³³ Bernadette Waluyo M, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (Bandung: Mandar Maju, 1999), hlm. 1

term includes a person against whom a involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt” yang artinya “keadaan atau kondisi seseorang (individu, persekutuan, perseroan, kotamadya) yang tidak sanggup untuk membayar hutang yang menjadi kewajibannya”. Syaratnya termasuk seseorang yang melawan permohonan tidak sengaja yang telah terpenuhi, atau yang telah memenuhi permohonan tidak sengaja, atau orang yang telah diputuskan bangkrut. Pengertian pailit menurut Black’s Law Dictionary tersebut dapat dihubungkan dengan “ketidakmampuan untuk membayar” dari seorang debitor atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela maupun atas permintaan pihak ketiga, yakni suatu permohonan pernyataan pailit ke pengadilan.³⁴

Secara etimologi kepailitan berasal dari kata pailit, selanjutnya istilah “pailit” berasal dari bahasa Belanda “failliet” yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan kata sifat. Istilah “failliet” sendiri berasal dari Perancis yaitu “faillite” yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran, sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata “to fail” dengan arti sama, dan dalam bahasa latin disebut “failure”. Selanjutnya istilah pailit dalam bahasa Belanda adalah “failliet”, maka ada pula sementara orang yang menerjemahkan sebagai “paiyit” atau “faillissement” sebagai kepailitan. Kemudian pada negara-negara yang berbahasa Inggris untuk

³⁴ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm 11.

pengertian pailit dan kepailitan mempergunakan istilah “bankrupt” dan “bankruptcy”.³⁵

2. Dasar Hukum Kepailitan

Dasar umum kepailitan adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata khususnya Pasal 1131 dan Pasal 1132. Kemudian dasar khusus tentang kepailitan di Indonesia, diatur dalam Undang- undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.³⁶

Di Indonesia pengaturan mengenai kepailitan sudah lama ada yaitu dengan berlakunya Kepailitan bukanlah merupakan suatu hal baru karena sesungguhnya masalah kepailitan di Indonesia sudah banyak terjadi sejak zaman penjajahan belanda. Hal itu terbukti dengan adanya Undang-Undang Kepailitan yang lebih dikenal dengan Staatblad tahun 1905 Nomor 217 jo Staatblad tahun 1906 Nomor 348 (verodening op het faillissement en de surseance van betaling). Jika ditelusuri sejarah hukum tentang kepailitan, diketahui bahwa hukum tentang kepailitan itu sendiri sudah ada sejak zaman Romawi. Kata bangkrut, yang dalam bahasa Inggris disebut bankrupt berasal dari undang-undang di Italia yang disebut dengan banca rupta. Pada abad pertengahan di Eropa, terjadi praktik kebangkrutan yang dilakukan dengan menghancurkan bangku-bangku dari para bankir atau pedagang

³⁵ Viktor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 18

³⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998*. (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002), hlm. 25

yang melarikan diri secara diam-diam dengan membawa harta para kreditornya. Adapun di Venetia (Italia) pada waktu itu, dimana para pemberi pinjaman (bankir) saat itu yang banco (bangku) mereka yang tidak mampu lagi membayar utang atau gagal dalam usahanya, bangku tersebut benar-benar telah patah atau hancur.³⁷

Bagi negara-negara yang menganut tradisi common law, tepatnya pada tahun 1952 merupakan tonggak, sejarah karena pada tahun tersebut hukum pailit dari tradisi hukum Romawi diadopsi ke negara Inggris. Hal tersebut ditandai dengan diundangkannya sebuah Undang-Undang yang disebut *Act Against Such Persons As Do Make Bankrupt*, yang menempatkan kebangkrutan sebagai hukuman bagi debitor nakal yang tidak mau membayar utangnya sekaligus berusaha menyembunyikan asset-assetnya. Undang-undang ini memberikan hak-hak bagi kelompok kreditor yang tidak dimiliki oleh kelompok kreditor secara individual.³⁸

Peraturan mengenai kepailitan diatur dalam peraturan tersendiri, yaitu dalam “Faillissementsverordening” (Staatblad tahun 1905 Nomor 217 jo Staatblad tahun 1906 Nomor 348), yang juga berlaku bagi golongan Cina dan Timur Asing.³⁹

Kedua peraturan yang diberlakukan di Indonesia ini merupakan akibat dari perbedaan antara pedagang dan bukan pedagang. Adanya dua macam peraturan tersebut, selain tidak perlu juga menimbulkan banyak kesulitan

³⁷ Jono, *Hukum Kepailitan, Ctk. Pertama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 1

³⁸ Munir Fuady, *Hukum Pailit (Dalam Teori Dan Praktek)*, Ctk. Pertama (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 4

³⁹ Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 8: Perwasitan, Kepailitan, dan Penundaan Pembayaran* (Jakarta: P.T Djambatan, 1992), hlm. 28

diantaranya ialah formalitasnya yang ditentukan terlalu banyak sehingga menimbulkan banyak kesulitan dalam pelaksanaannya seperti biaya tinggi, pengaruh kreditor terhadap jalannya kepailitan terlalu sedikit, serta pelaksanaan kepailitannya memakan waktu lama. Adanya kesulitan-kesulitan tersebut menimbulkan keinginan untuk membuat peraturan kepailitan yang sederhana dengan biaya rendah sehingga pelaksanaannya akan lebih mudah.⁴⁰

Pada tahun 1934 pemerintah belanda melakukan perubahan terhadap KUHD yaitu penghapusan Buku Ketiga dan perubahan Buku pertama Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, yang diganti dengan Faillissementwet. Hal tersebut juga mempengaruhi sistem hukum di hindia belanda, pengaruh ini dapat dilihat dengan dilakukannya penyatuan peraturan kepailitan yang ada, yang dilakukan dengan “Faillissementsverordening” (Staatblad tahun 1905 Nomor 217 jo Staatblad tahun 1906 Nomor 348), yang berlaku sejak 1 November 1906.

Saat ini terjadi banyaknya masalah dengan kredit macet yang dinilai oleh para ahli ekonomi tidak hanya menimbulkan krisis perbankan maupun krisis ekonomi, tetapi juga menimbulkan masalah sosial yang luas didalam masyarakat seperti masalah tenaga kerja dan aspek-aspek sosial lainnya yang menyangkut kepentingan Korporasi baik sebagai Kreditor ataupun Debitor. Penyelesaian masalah utang tersebut harus dilakukan dengan cepat dan efektif. Untuk maksud tersebut, pengaturan kepailitan termasuk

⁴⁰ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia* (Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 3

masalah penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan salah satu masalah penting yang harus diselesaikan.

Selama ini masalah kepailitan dan penundaan kewajiban membayar utang, tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan penyelesaian masalah kepailitan termasuk masalah penundaan kewajiban pembayaran utang secara adil, cepat, dan efektif. Sehubungan dengan adanya kebutuhan yang mendesak dari dunia usaha terhadap penyelesaian masalah utang piutang tersebut, maka pemerintah Indonesia segera melakukan reformasi hukum yaitu melakukan revisi terhadap peraturan tentang Kepailitan yang termuat dalam Staatblad tahun 1905 Nomor 217 jo Staatblad tahun 1906 Nomor 348.

Kelahiran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1998 tentang Kepailitan dan PKPU, mempunyai tujuan dan misi untuk menyakinkan para investor baik dari dalam maupun luar negeri terhadap kepastian hukum di Indonesia sehingga dapat meningkatkan kembali gairah investor untuk kembali menanamkan investasinya di Indonesia. Dalam perkembangannya, Perpu Kepailitan ini ditingkatkan statusnya menjadi Undang-Undang yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1998 menjadi Undang-Undang, yang kemudian disempurnakan kembali dengan UUKPKPU. Kehadiran Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU) ditengah masyarakat khususnya para pelaku bisnis yang sedang menghadapi masalah sengketa utang piutang diharapkan dapat membantu penyelesaiannya, karena sistem yang digunakan sangat cepat, adil, terbuka, dan efektif serta menjadi

pegangan bagi penyelesaian utang-piutang yang tidak saling merugikan melainkan sebaliknya justru saling menguntungkan para pihak yaitu Kreditor dan Debitor.

3. Faktor- faktor dan Asas- asas Kepailitan

Berdasarkan penjelasan Undang-undang No.37 Tahun 2004 terdapat beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu:

- 1) Untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor.
- 2) Untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan (kreditor separatis) yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor pailit atau para kreditor lainnya yaitu kreditor preferen dan kreditor konkuren.
- 3) Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri. Misalnya, debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor.

Undang-undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang ini didasarkan pada beberapa asas. Berdasarkan penjelasan Undang-undang No.37 Tahun 2004 asas-asas tersebut antara lain yaitu:

1) Asas Keseimbangan

Undang-undang No.37 Tahun 2004 mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik.

2) Asas Kelangsungan Usaha

Undang-undang No. 37 Tahun 2004 terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.

3) Asas Keadilan

Asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak mempedulikan kreditor lainnya.

4) Asas Integrasi

Asas integrasi dalam Undang-undang No.37 Tahun 2004 mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materiilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

4. Syarat- syarat pengajuan permohonan pailit.

Syarat-syarat pailit yang dinyatakan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.37 Tahun 2004 adalah :

“debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”.

1) Debitor Mempunyai Dua atau Lebih Kreditor

Keharusan adanya dua kreditor merupakan persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.37 Tahun 2004 yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para kreditor itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.”

Inti rumusan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa kebendaan yang merupakan sisi positif harta kekayaan seseorang

harus dibagi secara adil kepada setiap orang yang berhak atas pemenuhan perikatan individu ini, yaitu kreditor. Pengertian adil disini adalah harta kekayaan tersebut harus dibagi secara:

- a) *pari passau*, harta kekayaan harus dibagikan secara bersama-sama di antara para kreditornya;
- b) *prorata*, sesuai dengan besarnya imbalan piutang masing-masing kreditor terhadap utang debitor secara keseluruhan.⁴¹

Syarat memailitkan debitor berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.37 Tahun 2004 hanya dimungkinkan apabila debitor memiliki paling sedikit dua kreditor. Syarat mengenai keharusan adanya dua atau lebih kreditor dikenal sebagai *concursus creditorum*. Undang-undang No.37 Tahun 2004 akan kehilangan *raison d'être*-nya apabila seorang debitor hanya memiliki seorang kreditor. Eksistensi dari debitor yang hanya memiliki seorang kreditor diperbolehkan mengajukan pernyataan pailit terhadapnya, maka harta kekayaan debitor yang menurut ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata yang merupakan jaminan utang tidak perlu mengatur mengenai pembagian hasil penjualan harta kekayaan. Seluruh hasil penjualan harta kekayaan tersebut sudah pasti merupakan sumber pelunasan bagi kreditor satu-satunya itu. Tidak akan ada ketakutan terjadi perlombaan dan perebutan terhadap harta kekayaan debitor karena hanya ada satu orang kreditor.⁴²

⁴¹ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Op-Cit., hlm 107

⁴² Sutan Remy Sjahdeini, Op-Cit., hlm. 53.

Rasio kepailitan adalah jatuhnya sita umum atas semua harta benda debitor untuk kemudian setelah dilakukan rapat verifikasi tidak tercapai accord, dilakukan proses likuidasi atas seluruh harta benda debitor itu untuk kemudian dibagi-bagikan hasil perolehan kepada semua kreditornya sesuai tata urutan kreditor tadi menurut ketentuan Undang-undang No.37 Tahun 2004. Dengan demikian jika seorang debitor hanya memiliki satu orang kreditor saja, maka kepailitan akan kehilangan rasionya sehingga disyaratkan adanya concursus creditorum.⁴³

2) Tidak Membayar Sedikitnya Satu Utang Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih

Pengertian utang menurut Pasal 1 angka 6 Undang- undang No.37 Tahun 2004 adalah

“kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor”.

Pengertian utang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang yang dipinjam dari orang lain. Berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.37 Tahun 2004 yang dimaksud dengan utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan,

⁴³ Setiawan, *Ordonansi Kepailitan Serta Aplikasinya Kini. Dalam Rudhy A. Lontoh dkk (Ed.), Penyelesaian Utang-piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Bandung: Alumni 2001, hlm. 53

karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.

Utang seyogyanya diberi arti luas baik dalam arti kewajiban membayar sejumlah utang tertentu yang timbul karena adanya perjanjian utang piutang (debitor telah menerima sejumlah uang tertentu dari kreditornya), maupun kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu yang timbul dari perjanjian atau kontrak lain yang menyebabkan debitor harus membayar sejumlah uang tertentu. Utang bukan hanya kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu yang disebabkan debitor telah menerima sejumlah uang tertentu karena perjanjian kredit, tetapi juga kewajiban membayar debitor yang timbul dari perjanjian-perjanjian lain.⁴⁴

Suatu perjanjian biasanya terdapat suatu default clause: “jika debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan seperti di bawah ini, maka kreditor dapat melakukan penagihan utang tersebut secara sekaligus meskipun utang belum jatuh tempo” (misal apabila debitor digugat oleh pihak lain di luar perjanjian ini, atau barang dibebani sita jaminan dalam suatu gugatan atau lalai menyerahkan laporan keuangan sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan atau debitor bercerai dari istri atau suami). Dengan demikian default clause dapat diberlakukan dalam suatu klausula perjanjian, meskipun utang belum jatuh tempo, sehingga

⁴⁴ Ibid. hlm. 117.

kreditor dapat menagih dan apabila debitor yang ditagih berhenti membayar kewajibannya, maka kreditor dapat mengajukan kepailitan.

Acceleration clause memberikan hak kepada kreditor untuk mempercepat jangka waktu jatuh tempo dari utang, jika kreditor merasa dirinya tidak aman (*deems itself insecure*). *Acceleration clause* lebih luas daripada *default clause* yang digunakan apabila kreditor memandang bahwa hal tersebut perlu dilakukan, meskipun utang belum jatuh tempo, kreditor dapat mempercepat jatuh tempo utang debitor dalam hal terjadi *event of default*, artinya telah terjadi sesuatu atau tidak dipenuhinya sesuatu yang diperjanjikan oleh debitor dalam perjanjian kredit sehingga menyebabkan kreditor mempercepat jatuh tempo. Untuk menggunakan *acceleration clause* harus disertai adanya *good faith*, yang dimaksud *good faith* adalah adanya *reasonable evidence*, dan bukti tersebut tidak harus berupa putusan Pengadilan. Pada umumnya dalam *common law* tidak menyebutkan pengertian *good faith* tapi di sini justru ditekankan.⁴⁵

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.37 Tahun 2004 tidak membedakan tetapi menyatukan syarat utang yang telah jatuh waktu dan utang yang telah dapat ditagih. Penyatuan tersebut ternyata dari kata “dan” di antara kata “jatuh waktu” dan “dapat ditagih”. Kedua istilah tersebut sebenarnya berbeda pengertian dan kejadiannya. Suatu utang

⁴⁵ Setiawan, *Beberapa Catatan Tentang Pengertian Jatuh Tempo Dalam Masalah Kepailitan. Dalam Emmy Yuhassarie (Ed.), Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya* (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2004), hlm. 124

dapat saja telah dapat ditagih tapi belum jatuh waktu. Utang yang telah jatuh waktu ialah utang yang dengan lampaunya waktu penjadwalan yang ditentukan dalam perjanjian tersebut, menjadi jatuh waktu dan karena itu pula Kreditor berhak untuk menagihnya. Akan tetapi, dapat terjadi bahwa sekalipun belum jatuh waktu tetapi utang tersebut telah dapat ditagih karena terjadi salah satu dari peristiwa-peristiwa yang disebut events of default.

Seharusnya kata-kata di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- undang No.37 Tahun 2004 yang berbunyi “utang yang telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih” diubah menjadi cukup berbunyi “utang yang telah dapat ditagih” atau “utang yang telah dapat ditagih baik utang tersebut telah jatuh waktu atau belum”. Penulisan kalimat tersebut dapat mengurangi selisih paham apakah utang “telah dapat ditagih” tetapi belum “jatuh waktu” dapat dijadikan alasan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit.⁴⁶

3) Atas Permohonan Sendiri Maupun Atas Permintaan Seseorang Atau Lebih Kreditornya

Ketentuan dalam Undang-undang No.37 Tahun 2004 menyatakan bahwa permohonan pernyataan pailit bukan saja dapat diajukan oleh kreditor tetapi juga memungkinkan diajukan secara sukarela oleh debitor

⁴⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), hlm. 57

sendiri. Undang-undang No.37 Tahun 2004 juga membedakan antara pengajuan permohonan terhadap debitor yang merupakan perusahaan-perusahaan bank, perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan asuransi, perusahaan re-asuransi, dana pensiun, dan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik di satu pihak dan terhadap debitor non perusahaan-perusahaan yang telah disebutkan di pihak lain⁴⁷ (Sutan Remy Sjahdeini, 2009:103).

Permohonan pernyataan pailit sesuai Pasal 2 Undang- undang No.37 Tahun 2004, dapat diajukan oleh:

- a) Debitor sendiri
- b) Seseorang atau lebih kreditor
- c) Kejaksaan
- d) Bank Indonesia
- e) Bapepam
- f) Menteri Keuangan

5. Pihak- pihak yang dapat mengajukan pailit

1) Debitor

Pengertian debitor menurut Pasal 1 angka 3 Undang- undang No.37 Tahun 2004 adalah “orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan”.

⁴⁷ Ibid. hlm. 103.

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.37 Tahun 2004 menyatakan bahwa debitor berhak mengajukan permohonan pailit untuk dirinya sendiri dalam bahasa Inggris disebut *voluntary petition*. Ketentuan bahwa debitor dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap dirinya sendiri adalah ketentuan yang dianut oleh banyak negara sehingga hal ini merupakan ketentuan yang lazim. Akan tetapi, ketentuan tersebut membuka kemungkinan bagi debitor yang nakal untuk melakukan rekayasa demi kepentingannya.⁴⁸

Menurut Retnowulan Sutantio, rekayasa-rekayasa yang mungkin dilakukan oleh debitor untuk menguntungkan dirinya sendiri dalam kepailitan yaitu:

- a) Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh seorang pemohon yang dengan sengaja telah membuat utang kanan-kiri dengan maksud untuk tidak membayar dan setelah itu mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit.
- b) Kepailitan diajukan oleh teman baik termohon pailit, yang berkolusi dengan orang atau badan hukum yang dimohon agar dinyatakan pailit, sedangkan alasan yang mendukung permohonan tersebut sengaja dibuat tidak kuat, sehingga jelas permohonan akan ditolak oleh Pengadilan Niaga. Permohonan semacam ini justru diajukan untuk menghindarkan agar kreditor

⁴⁸ Ibid. hlm. 104.

lain tidak dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor itu, setidaknya permohonan kreditor lain akan terhambat.⁴⁹

Permohonan pailit yang diajukan oleh debitor berbentuk Perseroan Terbatas (PT) harus memenuhi ketentuan Pasal 104 Undang-undang No.40 ayat (1) Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang berisi:

“Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit atas Perseroan sendiri kepada pengadilan niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”.

2) Dua atau lebih Kreditor

Pengertian kreditor menurut Pasal 1 angka 2 adalah “orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan”. Pengertian "kreditor" dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.37 Tahun 2004 adalah kreditor konkuren, kreditor separatis dan kreditor preferen. Khusus mengenai kreditor separatis, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitor dan haknya untuk didahulukan. Bilamana terdapat sindikasi kreditor maka masing-masing kreditor adalah kreditor

⁴⁹ Retnowulan Sutantio, *Tanggung Jawab Pengurus Perusahaan Debitor Dalam Kepailitan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 334

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No.37 Tahun 2004.

Sehubungan dengan hak kreditor untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit maka perlu diperhatikan jurisprudensi tetap di Belanda sejak putusan HR 26 Juni 1942, NJ 1942, 585 yang menegaskan bahwa “kewenangan/hak untuk mengajukan permohonan pailit hanya dimiliki kreditor yang mempunyai kepentingan wajar (redelijk belang) dalam kepailitan debitornya. Berkaitan dengan hal ini menarik untuk menyebut bahwa putusan Pengadilan Niaga No.33/Pailit/2001/PN.Niaga/Jkt.Pst tanggal 20 Agustus 2001 tentang permohonan pailit PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Putusan tersebut menegaskan bahwa pemegang polis baru berstatus sebagai kreditor apabila peristiwa yang dipertanggungjawabkan telah terjadi sehingga karenanya perusahaan asuransi mempunyai kewajiban atau utang kepada pemegang polis. Adapun penentuan apakah kreditor pemohon mempunyai “kepentingan wajar dalam pernyataan pailit” debitor ditentukan oleh keadaan yang berlaku pada saat permohonan diajukan.⁵⁰

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.37 Tahun 2004, menurut Imran Nating apabila dua atau lebih kreditor dapat mengajukan permohonan pailit untuk debitor yang sama maka dua atau lebih kreditor

⁵⁰ Fred BG. Tumbuan, *Mencermati Makna Debitor, Kreditor, dan Utang Berkaitan Dengan Kepailitan. Dalam Emmy Yuhassarie (Ed.), Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya* (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2004), hlm. 21

tersebut harus mampu membuktikan secara sederhana di persidangan mengenai hak kreditor untuk menagih piutang kepada debitor.⁵¹

Pembuktian sederhana menurut Ricardo Simanjuntak merupakan suatu syarat absolut yang membatasi kewenangan Pengadilan Niaga dalam upaya membuktikan seorang debitor yang dimohonkan pailit tersebut terbukti mempunyai sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, serta tidak dapatnya debitor tersebut untuk melunasi utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tersebut. Konsekuensi dari pembuktian sederhana yakni utang-utang yang dijadikan dasar untuk mengajukan pailit adalah utang-utang yang mudah dibuktikan keberadaan dan kematangannya.⁵²

3) Kejaksaan untuk kepentingan umum

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang- undang No.37 Tahun 2004, Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pailit dengan alasan untuk kepentingan umum. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus telah terpenuhi yaitu debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pailit.

⁵¹ Imran Nating, *Peranan dan Tanggung jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 37

⁵² Ricardo Simanjuntak, *Esensi Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan. Dalam Emmy Yuhassarie (Ed.), Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya* (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2004), hlm. 52

Menurut penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No.37 Tahun 2004, yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, misalnya:

- a) debitor melarikan diri;
- b) debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan;
- c) debitor mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat;
- d) debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas;
- e) debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu; atau
- f) dalam hal lainnya menurut kejaksan merupakan kepentingan umum.

Tata cara pengajuan permohonan pailit yang diajukan oleh kejaksan sama dengan permohonan pailit yang diajukan oleh debitor atau kreditor, dengan ketentuan bahwa permohonan pailit dapat diajukan oleh kejaksan tanpa menggunakan jasa advokat. Berdasarkan penjelasan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2000, dalam permohonan pernyataan pailit tersebut, kejaksan dapat melaksanakannya atas inisiatif sendiri atau berdasarkan masukan dari masyarakat, lembaga, instansi pemerintah, dan badan lain yang dibentuk oleh pemerintah seperti Komite Kebijakan Sektor Keuangan.

Kewenangan kejaksaan untuk mengajukan permohonan pailit demi kepentingan umum menurut Suhandjono sebenarnya dapat dimanfaatkan dalam membantu usaha penyelamatan keuangan kekayaan negara. Kewenangan kejaksaan tersebut juga dapat membantu usaha penanggulangan krisis ekonomi.⁵³

4) Bank Indonesia

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (3) Undang- undang No.37 Tahun 2004 yang dimaksud dengan bank adalah bank sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan. Pengajuan permohonan pernyataan pailit bagi bank sepenuhnya merupakan kewenangan Bank Indonesia dan semata-mata didasarkan atas penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan, oleh karena itu tidak perlu dipertanggungjawabkan. Kewenangan Bank Indonesia untuk mengajukan permohonan kepailitan ini tidak menghapuskan kewenangan Bank Indonesia terkait dengan ketentuan mengenai pencabutan izin usaha bank, pembubaran badan hukum, dan likuidasi bank sesuai peraturan perundang- undangan. Oleh karena usaha bank amat terkait dengan kepentingan masyarakat, maka bubarnya suatu bank akan menimbulkan dampak yang luas bagi masyarakat, baik terhadap nasabah bank yang bersangkutan, maupun bagi bank- bank dan pihak lain

⁵³ Suhandjono.. *Fungsi Kejaksaan Dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara serta PengertianKepentingan Umum dalam Kepailitan. Dalam Rudhy A. Lontoh dkk (Ed.), Penyelesaian Utang piutang Melalui Pailit atau Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Bandung: Alumni, 2001), hlm. 597

yang terkait.⁵⁴

Ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang No.37 Tahun 2004 yang menyatakan kewenangan tunggal Bank Indonesia untuk memailitkan bank memperlihatkan secara tegas bahwa dunia perbankan tidak dapat disentuh oleh para mitra bisnisnya, kecuali Bank Indonesia. Dunia perbankan sarat dengan uang masyarakat yang harus dilindungi sehingga tembok raksasa yang diciptakan oleh Pasal 2 ayat (3) tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pasal 2 ayat (3) ini dalam praktiknya bertentangan dengan prinsip dan kedudukan Bank Indonesia sebagai pengawas dan pembina bank. Pilihan terbaik bagi Bank Indonesia justru bukan memailitkan bank, tetapi bagaimana menyehatkan kembali kemudian jika tidak bisa lalu ditutup. Memailitkan bank tentu berakibat pada keharusan mengikuti proses hukum maka akan terjadi kelambanan dalam menyelesaikan dana masyarakat pada bank dan pada akhirnya dapat bermuara pada *rush* serta kehilangan kepercayaan masyarakat.⁵⁵

5) Badan Pengawas Pasar Modal

Berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-undang No.37 Tahun 2004, jika debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan

⁵⁴ Bambang Setijoprodjo, *Segi-segi Hukum Kepailitan dan Likuidasi Ditinjau Dari Perspektif Bank. Dalam Rudhy A. Lontoh dkk (Ed.), Penyelesaian Utang-piutang Melalui Pailit atau Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Bandung: Alumni, 2001), hlm. 439

⁵⁵ Thomas Suyatno, *Bank Indonesia, Bank Tidak Sehat, BPPN dan Masalah Kepailitan. Dalam Rudhy A. Lontoh dkk (Ed.), Penyelesaian Utang-piutang Melalui Pailit atau Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Bandung: Alumni, 2001), hlm. 454

Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal. Permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal, karena lembaga tersebut melakukan kegiatan yang berhubungan dengan dana masyarakat yang diinvestasikan dalam efek di bawah pengawasan Badan Pengawas Pasar Modal. Badan Pengawas Pasar Modal juga mempunyai kewenangan penuh dalam hal pengajuan permohonan pernyataan pailit untuk instansi-instansi yang berada di bawah pengawasannya, seperti halnya kewenangan Bank Indonesia terhadap Bank.

6) Menteri Keuangan

Berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-undang No.37 Tahun 2004, apabila debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau BUMN yang bergerak di kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Penjelasan Pasal 2 ayat (5) Undang-undang No.37 Tahun 2004 terdapat beberapa pengertian yaitu:

- a) Perusahaan asuransi adalah perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan asuransi kerugian. Perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi adalah perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai usaha perasuransian. Kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi

sepenuhnya ada pada Menteri Keuangan. Ketentuan ini diperlukan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi sebagai lembaga pengelola risiko dan sekaligus sebagai lembaga pengelola dana masyarakat yang memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian.

- b) Dana pensiun adalah dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai dana pensiun. Kewenangan untuk mengajukan pailit bagi Dana pensiun, sepenuhnya ada pada Menteri Keuangan. Ketentuan ini diperlukan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap dana pensiun, mengingat dana pensiun mengelola dana masyarakat dalam jumlah besar dan dana tersebut merupakan hak dari peserta yang banyak jumlahnya.
- c) Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik adalah badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham. Kewenangan Menteri Keuangan dalam pengajuan permohonan pailit untuk instansi yang berada di bawah pengawasannya seperti kewenangan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

6. Mekanisme Permohonan Kepailitan

Permulaan dari pemeriksaan kepailitan didahului dengan pengajuan kepailitan oleh pihak-pihak yang berwenang. Permohonan itu diajukan

kepada Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitur. Permohonan kepailitan harus diajukan secara tertulis, dimana harus diajukan oleh seorang penasihat hukum yang telah memiliki ijin praktek dan berpengalaman dalam masalah hukum, sehingga diharapkan persidangan dapat berjalan dengan cepat dan fair. Panitera pengadilan setelah menerima permohonan tersebut segera melakukan pendaftaran terhadap si pemohon dan dimasukkan ke dalam daftar register sekaligus memberikan nomor pendaftaran kepada si pemohon yang disertai bukti tertulis yang telah ditandatangani oleh panitera, dimana tanggal bukti penerimaan tersebut harus sesuai dengan tanggal pada waktu si pemohon mendaftarkan diri ke pengadilan. Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat-ayat tersebut.

Panitera Pengadilan dalam jangka waktu 1 x 24 jam harus menyerahkan kepada ketua pengadilan, sedangkan ketua pengadilan mempelajari permohonan kepailitan tersebut dalam jangka waktu 2 x 24 jam, sekaligus menetapkan hari persidangannya. Ketua pengadilan memanggil para pihak untuk menghadiri pemeriksaan kepailitan tersebut, dimana pemeriksaan tersebut sudah harus dilakukan paling lambat 20 hari setelah permohonan tersebut didaftarkan. Untuk pemeriksaan perkara kepailitan yang diajukan oleh debitur, maka pengadilan tidak wajib untuk memanggil debitur (Pasal 8 ayat (1) UUKPKPU) sedangkan untuk perkara kepailitan yang diajukan oleh kejaksaan, debitur wajib dipanggil paling

lambat 7 hari sebelum persidangan untuk memberi kesempatan bagi para pihak untuk mempelajari permohonan dan memberi waktu yang cukup pada para pihak yang tempatnya jauh agar hadir tepat waktu.

Persidangan terhadap perkara kepailitan dapat ditunda selama 20 hari apabila terdapat alasan-alasan pembenar yang cukup mendasar dari para pihak, dimana dalam persidangan itu hakim akan mendengar keterangan dari pemohon, termohon, saksi-saksi dengan disertai bukti-bukti konkrit. Selama masa pemeriksaan hakim dapat memerintahkan panitera atau wakil panitera untuk melakukan penyegelan atau sita jaminan terhadap sebagian maupun seluruh harta kekayaan (boedel) debitur atas permohonan kreditur. Kreditur juga mempunyai hak untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan agar menunjuk kurator sementara yang tugasnya mengawasi pengelolaan usaha debitur dan mengawasi pembayaran pada debitur baik pengalihan maupun pengagunan kekayaan debitur yang memerlukan persetujuan dari kurator. Hal tersebut akan dikabulkan oleh pengadilan dengan syarat penyitaan tersebut sangat diperlukan untuk melindungi kepentingan kreditur. Setelah suatu permohonan pailit diterima dan kemudian diperiksa dan diadili oleh majelis hakim Pengadilan Niaga maka pemeriksaan terhadap permohonan tersebut dinyatakan selesai dengan dijatuhkannya putusan.⁵⁶

Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah tanggal

⁵⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, edisi keenam* (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 202

putusan pernyataan pailit diterima oleh Kurator dan Hakim Pengawas, Kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas, mengenai ikhtisar putusan pernyataan pailit yang memuat hal-hal sebagai berikut :

- 1) nama, alamat, dan pekerjaan Debitor;
- 2) nama Hakim Pengawas;
- 3) nama, alamat, dan pekerjaan Kurator; anggota panitia Kreditor sementara, apabila telah ditunjuk; dan
- 4) tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama Kreditor

Kurator juga berwenang melakukan pengurusan terhadap harta pailit meskipun dimintakan kasasi atau peninjauan kembali ke Mahkamah Agung dan apabila kasasi dan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, maka semua tindakan hukum yang dilakukan oleh kurator tetap sah dan mengikat bagi debitor (Pasal 16). Kurator juga bertugas untuk mengurus segala hubungan surat-menyurat antara pihak lain dengan debitor. Segala pembiayaan yang menyangkut pengakhiran kepailitan dibebankan kepada debitor dan harus ditetapkan oleh hakim dengan mengeluarkan Fiat Eksekusi yang kekuatan hukumnya mutlak sehingga tidak dapat dimintakan keberatan atau upaya hukum dalam bentuk apapun.

B. Tinjauan Umum Tentang Kurator

1. Pengangkatan, Penggantian, dan Pemberhentian Kurator

Pengertian kurator berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang No.37 Tahun 2004 yaitu “Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai undang-undang ini”. Tugas sebagai kurator menurut Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No.37 Tahun 2004 dilaksanakan oleh:

- 1) Balai Harta Peninggalan; atau
- 2) Kurator lainnya.

Menurut Vollmar sebagaimana dikutip oleh Zainal Asikin bahwa Balai Harta Peninggalan (BHP) dalam melakukan tindakan pemberesan harta pailit/debitor bertindak secara tidak langsung untuk dan sebagai wakil debitor. Akan tetapi dalam praktik (yurisprudensi) dengan HR tanggal 5 Maret 1920 dan HR tanggal 28 Oktober 1926 memutuskan bahwa kedudukan BHP tidak dapat dianggap sebagai pihak yang mewakili debitor di dalam kepailitan.⁵⁷

Pengertian kurator lainnya berdasarkan Pasal 70 ayat (2) Undang-undang No.37 Tahun 2004 dan penjelasannya yaitu:

⁵⁷ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 77

- a) Orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit. Keahlian khusus adalah mereka yang mengikuti dan lulus pendidikan kurator dan pengurus; dan
- b) Terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan. Terdaftar adalah telah memenuhi syarat-syarat pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan adalah anggota aktif organisasi profesi kurator dan pengurus.

Sutan Remy Sjahdeini mengutip dan telah menyetujui pendapat Andrew R. Keay dalam *McPherson The Law of Company Liquidation, Fourth Edition, Sydney: LBC Information Service, 1999, P287*. memberikan definisi mengenai Kurator sebagai berikut: “Kurator adalah perwakilan pengadilan dan dipercayai dengan mempertaruhkan reputasi pengadilan untuk melaksanakan kewajibannya dengan tidak memihak.”

Menurut Pasal 15 Undang-undang No.37 Tahun 2004 terdapat ketentuan mengenai pengangkatan kurator, yaitu:

- 1) Dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat kurator dan seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan.
- 2) Dalam hal debitor, kreditor, atau pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit tidak mengajukan usul pengangkatan kurator kepada pengadilan maka Balai Harta Peninggalan diangkat

selaku kurator.

- 3) Kurator yang diangkat harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara. Independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan bahwa kelangsungan keberadaan kurator tidak tergantung pada debitor atau kreditor dan kurator tidak memiliki kepentingan ekonomis yang sama dengan kepentingan ekonomis debitor atau kreditor.

Syarat untuk dapat didaftar sebagai kurator menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-HT.05.10 Tahun 2005 Tentang Pendaftaran Kurator dan Pengurus, yaitu:

- 1) Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
- 2) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 3) Setia kepada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia.
- 4) Sarjana hukum atau sarjana ekonomi jurusan akuntansi.
- 5) Telah mengikuti pelatihan calon kurator dan pengurus yang diselenggarakan oleh organisasi profesi Kurator dan pengurus bekerja sama dengan Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia.
- 6) Tidak pernah dipenjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana 5 tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- 7) Tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga;
- 8) Membayar biaya pendaftaran; dan
- 9) Memiliki keahlian khusus.

Demi kepentingan kepailitan sebaiknya Undang-undang No.37 Tahun 2004 memberikan ketentuan yang tegas mengenai hal-hal apa saja yang dianggap terjadi atau terdapat benturan kepentingan yang dimaksud itu. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, dianggap telah terjadi benturan kepentingan apabila terjadi antara lain hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kurator menjadi salah satu kreditor.
- 2) Kurator memiliki hubungan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali atau dengan pengurus dari perseroan debitor.
- 3) Kurator memiliki saham lebih dari 10% pada salah satu perusahaan kreditor atau pada perseroan debitor.
- 4) Kurator adalah pegawai, anggota direksi, atau anggota komisaris dari salah satu perusahaan kreditor atau dari perusahaan debitor.⁵⁸

Sewaktu melaksanakan penugasan ternyata kurator mengetahui bahwa ia ternyata memiliki benturan kepentingan dengan salah satu atau lebih kreditor, hakim pengawas, atau dengan anggota majelis hakim untuk penugasan tersebut, maka kurator wajib:

- 1) Memberitahukan secara tertulis adanya benturan tersebut kepada hakim

⁵⁸ Sutan Remy Sjahdeini, Op-Cit., hlm. 209

pengawas, debitor, rapat kreditor, dan komite kreditor jika ada, dengan tembusan kepada dewan kehormatan AKPI, serta wajib segera memanggil rapat kreditor untuk diselenggarakan secepatnya khusus untuk memutuskan masalah benturan tersebut; atau

- 2) Segera mengundurkan diri (Standar Profesi Kurator dan Pengurus, Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia).

Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-undang No.37 Tahun 2004 Pengadilan dapat setiap waktu mengabulkan usul penggantian kurator, setelah memanggil dan mendengar kurator, dan mengangkat kurator lain dan/atau mengangkat kurator tambahan atas:

- 1) permohonan kurator sendiri;
- 2) permohonan kurator lainnya, jika ada;
- 3) usul hakim pengawas; atau
- 4) permintaan debitor pailit.

Berdasarkan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang No.37 Tahun 2004 pengadilan harus memberhentikan atau mengangkat kurator atas permohonan atau atas usul kreditor konkuren berdasarkan putusan rapat kreditor yang diselenggarakan dengan persyaratan putusan tersebut diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat dan yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah piutang kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Jika akan mengundurkan diri maka kurator menyatakan pengunduran diri secara tertulis kepada pengadilan, dengan tembusan kepada hakim pengawas, panitia kreditor atau kurator lainnya jika ada. kurator terdahulu wajib:

- 1) Menyerahkan seluruh berkas-berkas dan dokumen, termasuk laporan-laporan dan kertas kerja kurator yang berhubungan dengan penugasan kepada kurator pengganti dalam jangka waktu 2x24 jam.
- 2) Memberikan keterangan selengkapnya sehubungan dengan penugasan tersebut khususnya mengenai hal-hal yang bersifat material serta diperkirakan dapat memberikan landasan bagi kurator pengganti untuk memahami penugasan selanjutnya.
- 3) Kurator terdahulu wajib membuat laporan pertanggungjawaban atas penugasannya dan menyerahkan salinan laporan tersebut kepada kurator pengganti (Standar Profesi Kurator dan Pengurus, Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia).

2. Tugas, Kewenangan, dan Tanggung Jawab Kurator

1) Tugas Kurator

Tugas kurator sehubungan dengan adanya pernyataan pailit yang telah ditetapkan oleh Pengadilan yaitu dalam jangka waktu paling lambat lima hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam sekurang- kurangnya dua surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim

Pengawas, mengenai hal-hal sebagai berikut :⁵⁹

- a) Ikhtisar putusan pernyataan pailit;
- b) Identitas, alamat, dan pekerjaan debitor;
- c) Identitas, alamat dan pekerjaan anggota panitia sementara kreditor apabila telah ditunjuk;
- d) Tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditor; dan
- e) Identitas Hakim Pengawas.

2) Wewenang Kurator

Secara umum dikatakan bahwa tugas utama kurator adalah untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Selanjutnya agar seorang kurator dapat melaksanakan tugas yang diberikan tersebut, kurator diberikan kewenangan sebagai berikut :⁶⁰

- a) Dibebaskan dari kewajiban untuk memperoleh persetujuan dan atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitor atau salah satu organ debitor, meskipun dalam keadaan diluar kepailitan, persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan.
- b) Melakukan pinjaman dari pihak ketiga, semata-mata dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit. Jika dalam melakukan pinjaman dari

⁵⁹ Parwoto Wignjosumarto, *Tugas dan Wewenang Hakim Pengawas dalam Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Makalah disampaikan pada Pelatihan Calon Hakim Pengadilan Niaga di Hotel Bumikarsa tanggal 6-11 November 2006, Jakarta: 2006, hlm. 64

⁶⁰ Ibid. hlm. 64

pihak ketiga kurator perlu membebani harta pailit dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya, maka pinjaman tersebut harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Hakim Pengawas, dan pembebanan tersebut hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta pailit yang belum dijadikan jaminan utang. Khusus untuk menghadapi dimuka pengadilan kurator diwajibkan untuk mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Hakim Pengawas, kecuali jika urusan yang dihadapinya di Pengadilan adalah semata-mata yang berhubungan dengan sengketa pencocokan piutang atau hal-hal yang diatur dalam Pasal 37-39 dan Pasal 5 ayat (3).⁶¹

3) Tanggung Jawab Kurator

Berdasarkan Pasal 72 UUKPKPU disebutkan bahwa Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atas kekeliruannya dalam melaksanakan pengurusan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit, hal ini sejalan dengan besarnya tanggung jawab dan juga imbalan jasa yang diberikan kepada Kurator.⁶²

Tanggung jawab kurator menurut Jerry Hoff sebagaimana dikutip oleh Imran Nating dibagi ke dalam dua macam bentuk pertanggungjawaban, yaitu:

a) Tanggung jawab kurator dalam kapasitas profesi sebagai kurator

⁶¹ Ibid. hlm. 65

⁶² Ibid. hlm. 65

Tanggung jawab kurator dalam kapasitas profesi sebagai kurator dibebankan pada harta pailit dan bukan pada kurator secara pribadi yang harus membayar kerugian, sehingga kerugian yang timbul menjadi beban harta pailit. Pihak yang menuntut mempunyai tagihan atas harta kepailitan dan tagihannya adalah utang harta pailit. Perbuatan kurator tersebut antara lain:

- (1) Kurator lupa untuk memasukkan salah satu kreditor dalam rencana distribusi;
- (2) Kurator menjual aset debitor pailit yang tidak termasuk dalam harta pailit;
- (3) Kurator menjual aset pihak ketiga;
- (4) Kurator berupaya menagih tagihan debitor pailit dan melakukan sita atas properti debitor, kemudian terbukti bahwa tuntutan debitor tersebut palsu.⁶³

b) Tanggung jawab pribadi Kurator.

Berdasarkan Pasal 72 Undang-undang No.37 Tahun 2004, kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Pasal 78 Undang-undang No.37 Tahun 2004, tidak adanya kuasa atau izin dari hakim pengawas, dalam hal kuasa atau izin diperlukan, atau tidak diindahkannya

⁶³ Jerry Hoff dalam Imran Nating, Op-Cit., hlm. 116

ketentuan dalam Pasal 83 dan Pasal 84, tidak mempengaruhi sahnyanya perbuatan yang dilakukan oleh kurator kepada pihak ketiga. Kurator bertanggung jawab terhadap debitor pailit dan kreditor sehubungan dengan perbuatannya tersebut.

Kerugian yang muncul sebagai akibat dari tindakan atau tidak bertindak kurator menjadi tanggung jawab kurator. Kurator bertanggung jawab secara pribadi terhadap perbuatannya tersebut. Kurator harus membayar sendiri kerugian yang ditimbulkannya. Tanggung jawab ini dapat terjadi, misalnya jika kurator menggelapkan harta pailit.⁶⁴

Dengan tanggung jawab yang dimilikinya dapat timbul kesan bahwa kurator menggantikan kedudukan direksi/komisaris, termasuk pemenuhan kewajiban perusahaan sebagai suatu badan usaha/badan hukum. Perlu diingat bahwa kurator tidak menggantikan kedudukan direksi/komisaris sehubungan dengan pengurusan harta kekayaan perusahaan pailit. Kurator hanya bertanggung jawab atas pengurusan dan pemberesan kekayaan perusahaan. Kewajiban dan tanggung jawab sebagai pengurus perusahaan, di luar pengurusan kekayaan perusahaan, tetap berada di tangan direksi dan komisaris.⁶⁵

⁶⁴ Imran Nating, *Op-Cit.*, hlm. 117

⁶⁵ Amir Abadi Jusuf, *Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris Perusahaan Pailit. Dalam Emmy Yuhassarie (Ed.), Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya* (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2004), hlm. 252

3. Perlawanan terhadap Kurator

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh kurator menurut Sutan Remy Sjahdeini tidak serta merta dapat diterima begitu saja oleh kreditor atau panitia kreditor ataupun oleh debitor pailit apabila perbuatan hukum itu dirasakan merugikan (Sutan Remy Sjahdeini, 2009:230)⁶⁶. Berdasarkan Pasal 77 Undang-undang No.37 Tahun 2004, setiap kreditor, panitia kreditor, dan debitor pailit dapat mengajukan surat keberatan kepada hakim pengawas terhadap perbuatan yang dilakukan oleh kurator atau memohon kepada hakim pengawas untuk mengeluarkan surat perintah agar kurator melakukan perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan yang sudah direncanakan. Hakim pengawas harus menyampaikan surat keberatan kepada kurator maksimal 3 (tiga) hari setelah surat keberatan diterima dan kurator harus memberikan tanggapan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah menerima surat keberatan. Setelah itu hakim pengawas memberikan penetapan setelah menerima tanggapan surat keberatan dari kurator maksimal dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.

⁶⁶ Sutan Remy Sjahdeini, Op-Cit., hlm. 230

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tugas Kurator Mengimplementasikan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 Dalam Mengakomodasi Dan Memberikan Perlindungan Hak Pekerja Ketika Perusahaan Mengalami Keadaan Pailit.

Bahwa Peneliti berpendapat keputusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara No. 67/PUU-XI/2013 yang pertama yaitu bahwa pekerja/buruh secara sosial ekonomis berkedudukan lebih lemah dibandingkan dengan pengusaha/pemodal maka secara hukum sudah sepatutnya pekerja/buruh mendapatkan perlakuan yang sama dan adil sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*. Hal ini menjadi acuan bagi pekerja/buruh dikarenakan pekerja/buruh juga merupakan Warga Negara Indonesia yang dilindungi UUD 1945 yang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Kedua, bahwa upah pekerja/buruh harus didahulukan berdasarkan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 telah jelas menyatakan bahwa *“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”*. Pasal tersebut telah jelas menyatakan bahwa pekerja/buruh yang merupakan bagian dari pembangunan Negara yang berhak untuk bekerja

serta mendapat imbalan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar hidup bagi diri dan keluarga pekerja karena kepentingan manusia terhadap diri dan kehidupannya harus menjadi prioritas. Upah pekerja/buruh tersebut sesungguhnya adalah hutang pengusaha/pemodal kepada pekerja/buruh yang seharusnya dibayar atas hasil keringatnya. Maka wajar apabila upah pekerja/buruh didahulukan sebab upah pekerja/buruh merupakan hak konstitusional sebagaimana Pasal 28D ayat (2) UUD 1945.

Ketiga, apabila dibandingkan dengan kewajiban terhadap Negara yakni Pajak, maka sudah seharusnya upah pekerja/buruh yang didahulukan karena menurut Fritz Neumark fungsi pajak yaitu Fiscal or Budgetary Function, Economic Function dan Social Function yang keseluruhan fungsi pajak tersebut memiliki arti bahwa fungsi Pajak untuk menstabilkan ekonomi, mencegah pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Apabila tidak mendahulukan pembayaran upah pekerja/buruh pada saat perusahaan mengalami kepailitan, ditakutkan dapat terjadi gejolak ekonomi yang tidak stabil akibat sumber kehidupan pekerja/buruh tidak terlaksana sehingga menyebabkan lambatnya pertumbuhan ekonomi. Selain dari itu juga, Negara juga mempunyai sumber pembiayaan lain selain pajak sedangkan pekerja/buruh yakni upah merupakan satu-satunya sumber untuk mempertahankan hidup bagi diri dan keluarga pekerja/buruh.

Bahwa berdasarkan wawancara Peneliti dengan bapak James Purba, S.H., M.H. selaku Kurator serta Ketua Umum Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia, Bapak James mengungkapkan jika Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia juga pro dan mendukung ketentuan dalam Putusan Mahkamah

Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 dengan alasan tagihan upah pekerja/buruh yakni upah yang merupakan satu-satunya sumber untuk mempertahankan hidup bagi diri dan keluarga pekerja/buruh. Namun dalam melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 Kurator dihadapkan oleh ketidakpastian ketentuan dalam Peraturan Undang-undangan yaitu Undang-undang Kepailitan , Undang-undang Ketenagakerjaan, dan Ketentuan Umum Perpajakan yang saling bertabrakan karena tiap Undang-undang tersebut saling klaim atas hak yang harus didahulukan.

Kurator sebagai organ penting dalam kepailitan yakni mengurus dan/atau membereskan harta pailit. Tugas Kurator dalam hal mengimplementasikan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 tetap berdasarkan pada Undang-undang No.37 Tahun 2004. Sedemikian pentingnya tugas kurator maka dalam putusan pernyataan pailit langsung mengangkat kurator dan hakim pengawas seperti tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang No.37 Tahun 2004. Untuk melaksanakan tugasnya tersebut kurator harus berpijak pada Undang- undang No.37 Tahun 2004 dimana dalam undang-undang tersebut terdapat pasal-pasal yang mengatur mengenai tugas dan wewenang kurator. Peranan kurator yang begitu penting dalam penanganan kepailitan tentunya harus didukung dengan aturan hukum yang memadai.

Menurut Bapak James Purba, Undang- undang No.37 Tahun 2004 harus mampu menjadi payung hukum bagi Kurator dalam melaksanakan tugasnya. Peraturan tersebut harus mampu memberi ruang gerak bagi kurator agar dapat menyelesaikan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit secara akuntabel.

Adapun beberapa kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang No.37 Tahun 2004 agar tugas kurator dapat diselesaikan secara akuntabel yaitu:

1. Kurator berwenang menjalankan tugasnya sejak tanggal putusan pailit diucapkan.

Undang-undang No.37 Tahun 2004 pada Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat kurator dan seorang hakim pengawas. Menurut Pasal 15 ayat (2), debitor, kreditor ataupun pihak lain yang berkepentingan dalam perkara pailit ini berhak untuk mengusulkan pengangkatan kurator, namun apabila tidak diusulkan mengenai pengangkatan kurator maka Balai Harta Peninggalan diangkat selaku kurator oleh pengadilan niaga.

Pengangkatan tersebut bertujuan mengisi kekosongan jabatan kurator apabila tidak diusulkan pengangkatan kurator oleh debitor, kreditor ataupun pihak lain yang berkepentingan. Pengangkatan kurator bersamaan dengan putusan pernyataan pailit guna mewujudkan sifat serta merta. Sifat serta merta dari putusan pailit tersebut dapat dilihat pada Pasal 16 ayat (1) Undang-undang No.37 Tahun 2004 yakni kurator berwenang untuk melaksanakan tugas pengelolaan dan/atau pemberesan harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan. Sejak putusan pailit diucapkan atau sejak pukul 00.00 waktu setempat pada tanggal dijatuhkannya putusan pailit maka kurator dapat langsung menjalankan tugasnya terhadap harta pailit milik debitor.

Kewenangan kurator untuk menjalankan tugasnya semakin tegas didukung dalam kelanjutan kalimat Pasal 16 ayat (1) Undang-undang No.37 Tahun 2004 yakni pengajuan kasasi atau upaya hukum lain terhadap putusan pailit tidak menghalangi kurator untuk menjalankan tugasnya. Pada Pasal 16 ayat (2) dinyatakan jika putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali, maka segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan pailit tetap sah dan mengikat debitor. Kewenangan yang diberikan Undang-undang No.37 Tahun 2004 pada kurator untuk menjalankan tugasnya baik ketika sedang diajukan upaya hukum lain oleh debitor pailit atau setelah putusan pailit dibatalkan oleh upaya hukum lain tersebut merupakan suatu bentuk dukungan terhadap kurator agar menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien tanpa perlu terhambat oleh adanya suatu upaya hukum sehingga putusan pailit dapat segera dijalankan oleh kurator dan hak-hak kreditor dapat secepat mungkin terpenuhi.

2. Kurator dapat mengambil alih perkara dan meminta pengadilan untuk membatalkan segala perbuatan hukum debitor pailit.

Suatu tuntutan hukum yang diajukan oleh debitor dan proses hukum tersebut sedang berjalan selama kepailitan berlangsung, maka atas permohonan tergugat, perkara harus ditangguhkan untuk memberikan kesempatan bagi kurator mengambil alih perkara yang didasarkan pada Pasal 28 ayat (1) Undang-undang No.37 Tahun 2004. Berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) tersebut kurator mempunyai hak untuk menolak

mengambil alih perkara sedangkan menurut Pasal 28 ayat (4), apabila kurator ingin mengambil alih perkara maka tidak perlu mendapat panggilan dan dapat setiap waktu mengambil alih perkara sebagaimana tercantum dalam ayat (1) serta dapat memohon agar debitor dikeluarkan dari perkara.

Kewenangan yang diberikan kepada kurator untuk sewaktu- waktu mengambil alih perkara debitor pailit dapat digunakan untuk membuktikan bahwa perbuatan debitor pailit tersebut bertujuan untuk merugikan kreditor dan hal ini diketahui oleh pihak lawan sesuai dengan Pasal 30 Undang-undang No.37 Tahun 2004 maka kurator berhak untuk mengajukan pembatalan atas segala perbuatan debitor sebelum pailit. Berdasarkan Pasal 36 kurator dapat mengambil keputusan terhadap nasib perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi oleh debitor pailit.

Pasal 41 ayat (1) Undang-undang No.37 Tahun 2004 demi kepentingan harta pailit, maka kepada pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditor yang dilakukan oleh debitor sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Permohonan seperti dalam Pasal 41 ayat (1) tersebut dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim apabila dapat dipenuhi syarat dalam ketentuan Pasal 41 ayat (2) yakni dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan dilakukan, debitor dan pihak ketiga tersebut mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor.

Kewenangan untuk membatalkan perbuatan hukum debitor

dinamakan *actio pauliana*. *Actio pauliana* adalah suatu legal recourse yang diberikan kepada kurator untuk membatalkan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh debitor pailit sebelum penetapan pernyataan pailit dijatuhkan apabila kurator menganggap bahwa tindakan-tindakan hukum yang dilaksanakan oleh debitor pailit tersebut merugikan kepentingan kreditor-kreditor yang lainnya.⁶⁷

3. Kurator berwenang untuk melakukan pinjaman pada pihak ketiga

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang- undang No.37 Tahun 2004 yaitu tentang tugas kurator untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit maka pada Pasal 69 ayat (2) huruf b maka kurator dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga guna meningkatkan nilai harta pailit. Pinjaman tersebut memerlukan izin dari hakim pengawas apabila perlu membebani harta pailit dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau agunan atas kebendaan lainnya yang didasarkan pada Pasal 69 ayat (3). Pembebanan tidak dapat dilakukan pada seluruh harta pailit karena terdapat pengecualian pada pembebanan tersebut. Pada Pasal 69 ayat (4) pembebanan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau agunan atas kebendaan lainnya untuk melakukan pinjaman kepada pihak ketiga hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta pailit yang belum dijadikan jaminan utang.

⁶⁷ Timur Sukirno, *Tanggung Jawab Kurator terhadap Harta Pailit dan Penerapan Actio Pauliana. Dalam Rudhy A. Lontoh dkk (Ed.), Penyelesaian Utang-piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumni, 2001) hlm. 369-378.

Perlu diingat Pasal 55 ayat (1) Undang-undang No.37 Tahun 2004 bahwa pasal tersebut dengan tegas dinyatakan setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau agunan atas kebendaan lainnya dapat mengeksekusi haknya atas harta debitor seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Hak eksekusi tersebut dapat ditangguhkan hingga 90 hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan sebagaimana terdapat pada Pasal 56 ayat (2). Pasal 69 ayat (4) dapat dilaksanakan oleh kurator untuk mendapatkan pinjaman dari pihak ketiga agar nilai harta pailit dapat ditingkatkan tanpa mengurangi hak kreditor yang memegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau agunan atas kebendaan lainnya untuk mengeksekusi haknya tersebut dengan cara pinjaman dari pihak ketiga dibebankan dengan hak pada harta pailit yang belum dijadikan jaminan utang. Dengan demikian tidak terjadi benturan hak antara kurator dan kreditor separatis yang mempunyai hak untuk mendahului mengeksekusi haknya atas harta pailit setelah penangguhan 90 hari serta setelah penagihannya dicocokkan.

4. Tindakan kurator tetap sah walaupun tanpa adanya izin dari hakim pengawas

Berdasarkan Pasal 78 ayat (1) Undang-undang No.37 Tahun 2004 tidak adanya kuasa atau izin dari hakim pengawas, jika kuasa atau izin diperlukan, atau tidak diindahkannya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dan Pasal 84 yaitu ketentuan dalam rapat kreditor, tidak mempengaruhi sahnya perbuatan yang dilakukan oleh kurator terhadap pihak ketiga. Sehubungan perbuatannya tersebut berdasarkan Pasal 78 ayat

(2) kurator sendiri bertanggung jawab terhadap debitor pailit dan kreditor.

Tindakan kurator tetap sah walaupun tanpa adanya izin dari hakim pengawas namun tidak berarti kurator dapat melakukan tindakan pengurusan dan pemberesan sesukanya. Untuk melakukan tindakannya tersebut, kurator harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu:

- a. Apakah dia berwenang untuk melakukan hal tersebut;
- b. Apakah merupakan saat yang tepat (terutama secara ekonomi dan bisnis) untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu;
- c. Apakah terhadap tindakan tersebut diperlukan terlebih dahulu keikutsertaan dari pihak-pihak tertentu, seperti hakim pengawas, pengadilan niaga, panitia kreditor, debitor dan sebagainya;
- d. Harus dilihat cara yang layak dari segi hukum, kebiasaan dan sosial dalam menjalankan tindakan-tindakan tertentu.⁶⁸

Menurut Pasal 78 Undang-undang No.37 Tahun 2004, tidak adanya kuasa atau izin dari hakim pengawas, jika kuasa atau izin diperlukan, atau tidak diindahkannya ketentuan dalam Pasal 83 dan Pasal 84, tidak mempengaruhi sahnya perbuatan yang dilakukan oleh kurator kepada pihak ketiga. Sehubungan dengan perbuatan tersebut kurator bertanggung jawab terhadap debitor pailit dan kreditor. Menurut Imran Nating kerugian yang muncul sebagai akibat dari tindakan atau tidak bertindak kurator menjadi tanggung jawab kurator secara pribadi. Kurator harus membayar sendiri kerugian yang ditimbulkannya. Tanggung jawab ini dapat terjadi,

⁶⁸ Munir Fuady, Op-Cit., hlm. 44.

misalnya jika kurator menggelapkan harta pailit.⁶⁹

5. Kurator berwenang untuk mengamankan harta pailit

Sebagaimana ditentukan oleh Pasal 98 Undang-undang No.37 Tahun 2004, maka sejak mulai pengangkatannya kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya serta kemudian memberikan tanda terima. Terhadap uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya yang termasuk harta pailit, selain mencatat kurator juga berwenang menyimpannya sendiri seperti tercantum dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-undang No.37 Tahun 2004. Berdasarkan Pasal 108 ayat (2) kurator berwenang untuk menyimpan uang tunai yang tidak diperlukan untuk pengurusan harta pailit di bank guna kepentingan harta pailit. Menurut penjelasan Pasal 108, yang dimaksud dengan disimpan oleh kurator sendiri dalam pengertian tidak mengurangi kemungkinan efek atau surat berharga tersebut disimpan oleh kustodian, tetapi tanggung jawab tetap atas nama debitor pailit. misalnya deposito atas nama kurator qq debitor pailit. Menurut Marjan E. Pane tindakan ini merupakan tindakan pengamanan terhadap sebagian dari harta pailit. Bersamaan dengan pembekuan rekening, kurator wajib pula membuka rekening baru. Sangat penting disini bahwa pembukaan rekening harus atas nama kurator qq debitor pailit karena adalah suatu kekeliruan jika kurator membuka rekening tersebut atas namanya sendiri mengingat resikonya cukup besar, misalnya

⁶⁹ Imran Nating, Op-Cit., hlm. 117.

kematian kurator.⁷⁰

Sejak pengangkatannya, kurator harus melakukan upaya-upaya untuk mengamankan harta pailit. Tindakan ini mencakup seluruh harta debitor. Khusus untuk harta tertentu maka kurator berpedoman dalam Standar Profesi Kurator dan Pengurus yang dikeluarkan oleh Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia, untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan sebagai berikut:

a. Rekening Bank

Sesegera mungkin Kurator memberitahukan kepailitan debitor dan akibat hukumnya kepada bank atau lembaga keuangan lainnya dimana debitor memiliki rekening dan memastikan bahwa debitor pailit tidak lagi berwenang untuk mengelola rekening tersebut. Kemudian kurator meminta bank yang bersangkutan memindahkan rekening debitor pailit ke dalam rekening kurator yang dibuka khusus untuk keperluan penugasannya tersebut.

b. Surat Berharga Atas Bawa dan Logam Mulia

Kurator mengambil dan menyimpan seluruh surat berharga, efek dan logam mulia dengan memberikan tanda terima kepada Debitor. Kemudian Kurator dapat menyimpan surat berharga, efek dan logam mulia di suatu

⁷⁰ Marjan E. Pane, *Inventarisasi Dan Verifikasi Dalam Rangka Pembersihan Harta Pailit Dalam Pelaksanaannya. Dalam Emmy Yuhassarie (Ed.), Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah- masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2004) hlm. 279- 288.

tempat yang aman dalam pengawasannya.

c. Surat Berharga Atas Nama

Kurator mengambil dan menyimpan seluruh surat berharga dengan memberikan tanda terima pada debitor. Kurator dapat menyimpan surat berharga tersebut di suatu tempat yang aman dalam pengawasannya. Bila perlu, kurator dapat memberitahukan kepailitan debitor dan akibat hukumnya pada pihak yang terkait dengan surat berharga tersebut dan memastikan debitor pailit tidak berwenang lagi untuk mengelola surat berharga tersebut tanpa persetujuan kurator.

d. Benda Tidak Bergerak

Kurator dapat meminta dan menyimpan seluruh sertifikat, surat-surat dan tanda bukti hak lainnya sehubungan dengan benda tidak bergerak milik debitor. Kurator dapat menyimpan surat berharga tersebut di suatu tempat yang aman dalam pengawasannya. Bila perlu, kurator dapat mengirimkan pemberitahuan tentang pernyataan pailit pada lembaga pendaftaran atau pihak lain yang berwenang atas harta tidak bergerak debitor pailit.

e. Benda Bergerak Lainnya

Kurator melakukan tindakan yang dianggap perlu untuk mengamankan benda bergerak yang termasuk harta pailit.

f. Korespondensi Debitor Pailit

Kurator harus segera melakukan upaya-upaya untuk memastikan

bahwa kurator memiliki akses penuh untuk seluruh korespondensi yang ditujukan kepada debitor pailit sehubungan dengan harta pailit (Standar Profesi Kurator dan Pengurus, Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia).

Untuk menghindari debitor melakukan hal-hal yang tidak diinginkan terhadap harta pailit misalnya mengalihkan atau merusak harta pailit, maka dengan alasan untuk mengamankan harta pailit, menurut Pasal 99 ayat (1) Undang-undang No.37 Tahun 2004 kurator dapat minta penzegelan harta pailit kepada hakim pengawas. Menurut Pasal 99 ayat (2), penzegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh juru sita di tempat harta tersebut berada dengan dihadiri oleh dua saksi yang salah satu diantaranya adalah wakil dari pemerintah daerah setempat. Pengertian wakil dari pemerintah daerah setempat menurut penjelasan Pasal 99 ayat (2) adalah lurah atau kepala desa atau yang disebut dengan nama lain. Menurut pendapat Marjan E. Pane, dengan syarat dapat dilakukan dengan cepat dan tepat maka penzegelan akan sangat membantu dalam memberikan perlindungan terhadap harta pailit berupa benda bergerak seperti perhiasan dan/atau surat-surat berharga.⁷¹

6. Kurator berhak menerobos hak privasi debitor pailit.

Sutan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa Undang-undang No.37 Tahun 2004 tidak menginginkan debitor pailit melakukan hubungan rahasia dengan pihak-pihak lain yang dapat membahayakan jumlah dan nilai harta

⁷¹ ibid halaman 285.

pailit.⁷² Untuk mencegah hal itu maka Pasal 105 ayat (1) memberikan kewenangan kepada kurator untuk membuka surat dan telegram yang dialamatkan kepada debitor pailit. Pasal 105 ayat (2) mewajibkan kepada kurator untuk segera menyerahkan kepada debitor pailit surat dan telegram yang tidak berkaitan dengan harta pailit.

Untuk menghindari Debitor Pailit menjalin komunikasi yang dapat membahayakan harta pailit maka Pasal 105 ayat (3) Undang-undang No.37 Tahun 2004 menentukan bahwa semua perusahaan pengiriman surat dan telegram memberikan kepada kurator, surat dan telegram yang dialamatkan pada debitor pailit. Berdasarkan penjelasan Pasal 105 bahwa sejak putusan pailit diucapkan semua wewenang debitor untuk menguasai dan mengurus harta pailit termasuk memperoleh keterangan mengenai pembukuan, catatan, rekening bank, dan simpanan debitor dari bank yang bersangkutan beralih kepada kurator. Kurator harus segera melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa dirinya memiliki akses penuh untuk seluruh korespondensi yang ditujukan kepada debitor pailit sehubungan dengan harta pailit (Standar Profesi Kurator dan Pengurus, Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia).

7. Kurator berwenang menjual harta pailit

Dijatuhkannya putusan pernyataan pailit memberikan konsekuensi kurator langsung berwenang untuk melaksanakan tugasnya. Semenjak saat itulah kurator harus mengamankan harta pailit bahkan meningkatkan nilai

⁷² Sutan Remy Sjahdeini., Op.cit.,hlm. 224

harta pailit tersebut agar ketika pembagian seluruh kreditor dapat terpenuhi haknya. Pengecualian terhadap pemenuhan hak-hak kreditor terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-undang No.37 Tahun 2004 bahwa setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya dapat mengeksekusi haknya tersebut seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Akan tetapi eksekusi tersebut tidak dapat langsung dilaksanakan karena berdasarkan Pasal 56 ayat (1) hak eksekusi tersebut harus ditangguhkan sampai dengan 90 hari sejak dijatuhkannya putusan pailit. Penangguhan tersebut bertujuan untuk memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian, mengoptimalkan harta pailit, memungkinkan kurator melaksanakan tugasnya secara optimal.

Selama masa penangguhan eksekusi tersebut kurator berwenang untuk menggunakan harta pailit berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak atau menjual harta pailit yang berupa benda bergerak yang berada dalam penguasaannya untuk kelangsungan usaha debitor yang tercantum pada Pasal 56 ayat (3) Undang-undang No.37 Tahun 2004. Akan tetapi terhadap kewenangan menjual harta pailit tersebut sebelumnya telah diberikan perlindungan yang wajar terhadap kepentingan kreditor atau pihak ketiga. Berdasarkan penjelasan Pasal 56 ayat (3) yang dimaksud perlindungan yang wajar adalah perlindungan yang perlu diberikan untuk melindungi kepentingan kreditor atau pihak ketiga yang haknya ditangguhkan. Pengalihan harta menyebabkan hak kebendaan tersebut dianggap berakhir demi hukum. Perlindungan yang wajar, antara lain, dapat berupa:

- a. ganti rugi atas terjadinya penurunan nilai harta pailit;
- b. hasil penjualan bersih;
- c. hak kebendaan pengganti; atau
- d. imbalan yang wajar dan adil serta pembayaran tunai (utang yang dijamin) lainnya.

Harta pailit yang dapat dijual oleh kurator terbatas pada barang persediaan (*inventory*) dan atau benda bergerak (*current assets*), meskipun harta pailit tersebut dibebani dengan hak agunan atas kebendaan.

Ketentuan Pasal 107 Undang-undang No.37 Tahun 2004 juga memberikan wewenang kepada kurator untuk mengalihkan harta pailit sejauh diperlukan untuk menutup biaya kepailitan atau apabila penahanan harta pailit tersebut mengakibatkan kerugian pada harta pailit walaupun terhadap putusan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Harta pailit yang dinilai tidak mencukupi untuk membayar seluruh biaya kepailitan maka kurator dan kreditor mengusulkan pada hakim pengawas untuk menyetujui agar perusahaan debitor dilanjutkan kembali guna memperoleh peningkatan nilai harta pailit. Nilai harta pailit yang telah dinilai cukup, kemudian hakim pengawas menghentikan kelanjutan pengurusan perusahaan debitor. Tata cara pemberesan harta pailit diatur pada Pasal 185 yakni penjualan dilakukan di muka umum namun apabila tidak tercapai maka dapat dilakukan penjualan di bawah tangan dengan izin hakim pengawas. Kurator memiliki wewenang untuk memutuskan tindakan yang akan diambil terhadap benda pailit yang tidak segera atau tidak dapat

dibereskan.

Kurator dapat memulai pemberesan dan penjualan semua harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan debitor pailit apabila:

- a. usul untuk mengurus perusahaan debitor tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, atau usul tersebut telah diajukan tapi ditolak; atau
- b. pengurusan terhadap perusahaan debitor dihentikan.

Kewenangan yang diberikan kepada kurator untuk menjual harta pailit dan memutuskan tindakan pada benda pailit yang tidak dapat dibereskan ditujukan agar proses pemberesan harta pailit menjadi lebih cepat selesai karena tidak terlalu banyak pihak yang turut campur dalam proses pemberesan. Dengan demikian adanya kurator yang mengambil tindakan dalam penjualan dan pemberesan harta pailit dapat memberikan arahan terwujudnya kepastian hukum sehingga tidak akan terjadi perselisihan panjang antara para kreditor sehingga proses penjualan sampai pembagian harta pailit dapat berjalan dengan cepat dan para kreditur dapat terpenuhi hak-haknya.

Berikut ini contoh perkara kepailitan yang telah ditangani Kurator dalam mengimplementasikan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 dalam mengakomodasi dan memberikan perlindungan hak pekerja ketika perusahaan mengalami keadaan pailit PT. Intergra Lestari.

Kasus Posisi :

PT. Intergra Lestari yang diputus pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No.06/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby, tanggal 30 Juli 2013, Majelis hakim dalam amar putusannya mengangkat Suwandi, S.H., Mardiansyah, S.H., Soemarso, S.H., M.H., sebagai tim Kurator yang memimpin pembagian harta PT. Integra Lestari kepada para kreditornya. Pengangkatan kurator dan hakim pengawas secara bersamaan dalam suatu amar putusan pailit telah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang- undang No.37 Tahun 2004 kemudian tugas kurator selanjutnya berdasarkan Pasal 15 ayat (4) adalah dengan jangka waktu paling lambat 5 hari setelah putusan pailit dibacakan, kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dalam 2 surat kabar harian mengenai ikhtisar putusan pailit.

Bahwa Tim Kurator telah melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 dalam mengakomodasi dan memberikan perlindungan hak pekerja PT. Integra Lestari, namun Kurator justru mendapatkan perlawanan dari Kepala Kantor Pajak Pratama Mojokerto dengan diajukannya gugatan perlawanan No. 24/Plw.Pailit/2014/PN.Niaga.Sby Jo No.06/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby di Pengadilan Negeri Surabaya. Bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan perlawanan oleh Kepala Kantor Pajak Pratama Mojokerto adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dari total piutang pajak yang diakui kurator sebesar Rp.15.001.560.248,00 (lima belas milyar satu juta lima ratus enam puluh ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah), Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto hanya memperoleh pembagian sebesar Rp.10.318.032.679,00 (sepuluh milyar tiga ratus delapan belas juta tiga puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) ;-
2. Bahwa dalil gugatan Kepala Kantor Pajak Pratama Mojokerto berdasarkan Pasal 21 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 3A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP) menyatakan *“Negara mempunyai hak mendahului untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak”*. Dengan demikian Negara adalah kreditur preferen yang mempunyai hak mendahului atas utang pajak diatas kreditur lainnya, termasuk kreditur separates.
3. Bahwa dengan demikian berdasarkan alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dalam proses kepailitan, Piutang Pajak merupakan hak Kas Negara yang pelunasannya harus didahulukan daripada pembayaran piutang kepada kreditur-kreditur lainnya (Pasal 1137 KUHPer Jo Pasal 21 UU KUP) dan Kurator bertanggung jawab dalam melaksanakan pelunasan utang pajak tersebut (Pasal 32 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UU KUP Jo Pasal 1 angka 3 UU PPSP). Dengan kata lain Kurator seharusnya mendahulukan/mengutamakan pelunasan Utang Pajak sebesar Rp.15.001.560.248,00 (lima belas milyar satu juta lima ratus enam puluh ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) dari

boedel pailit PT. Integra Lestari (dalam Pailit) .

4. Bahwa pembagian yang dilakukan oleh kurator kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto sebesar Rp.10.318.032.679,00 (sepuluh milyar tiga ratus delapan belas juta tiga puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah), ini berarti kurator telah melanggar undang-undang dan tidak memberikan perlindungan terhadap kepentingan negara dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto. Bahwa dengan demikian kurator sebagai Wakil PT. Integra Lestari (dalam Pailit) dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi dan/atau secara renteng terhadap pelunasan sisa piutang pajak yang tidak dilunasi oleh kurator dalam proses kepailitan ini, mengingat kurator seharusnya melunasi terlebih dahulu seluruh piutang pajak

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tim Kurator PT. Integra Lestari melalui Kuasa Hukumnya SIGIT DANANG JOYO, SH, DESS. AF, Dkk mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalil gugatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto adalah dalil yang sama sekali tidak benar dan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 tanggal 11 September 2014.
2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 tanggal 11 September 2014, tagihan urutan pembagian terhadap upah pekerja/buruh, kreditor separatis, hak-hak pekerja/buruh lainnya dan hak negara dalam suatu proses kepailitan adalah sebagai berikut :

- a. Upah Pekerja/buruh
 - b. Kreditor Separates
 - c. Hak-hak pekerja/buruh lainnya
 - d. Tagihan Hak Negara, Kantor Lelang dan badan umum yang dibentuk pemerintah.
3. Bahwa berdasarkan Pencatatan Harta Pailit PT. Integra Lestari (Dalam Pailit) tertanggal 5 Agustus 2013 harta pailit PT. Integra Lestari (Dalam Pailit) adalah berupa tanah, bangunan dan sarana pelengkap lainnya, mesin-mesin dan peralatannya, alat berat, stock persediaan barang serta inventaris kantor sebagaimana terperinci dalam Pencatatan Harta Pailit PT. Integra Lestari (Dalam Pailit) tertanggal 5 Agustus 2014 tersebut yang keseluruhannya merupakan aset yang dijaminkan kepada Kreditor Separatis yaitu PT. Bank CIMB Niaga, Tbk., PT. Bank International Indonesia, Tbk., PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. dan PT. Bank Victoria International, Tbk.
4. Bahwa berdasarkan Salinan Risalah Lelang No: 834/2014 tanggal 23 September 2014 terhadap harta pailit PT. Integra Lestari (Dalam Pailit) berupa tanah, bangunan dan sarana pelengkap lainnya, mesin-mesin dan peralatannya, alat berat, stock persediaan barang serta inventaris kantor tersebut telah laku terjual dalam pelaksanaan lelang eksekusi yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 2014 dengan harga transaksi sebesar Rp.118.010.000.000,- (seratus delapan belas milyar sepuluh juta Rupiah) (Bukti T-3), di mana setelah dikurangi dengan bea lelang dan PPh serta Maya-Maya kepailitan dengan total keseluruhan

sebesar Rp.16.536.987.521,- (enam belas milyar lima ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh satu Rupiah) dan dikurangi dana cadangan hasil penjualan agunan yang belum dibagikan sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar Rupiah), maka dana yang telah dibagikan oleh Tim Kurator kepada Kreditor Separatis berdasarkan proporsional jumlah tagihan dan nilai jaminan para Kreditor Separatis sebagaimana Daftar Pembagian Tahap I Harta Pailit PT. Integra Lestari (Dalam Pailit) tertanggal 2 Oktober 2014 (Bukti T-4) yang telah disetujui oleh Hakim Pengawas sebagaimana Penetapan Hakim Pengawas Nomor : 06/PKPU/2013/PN.Niaga.Sby. tanggal 9 Oktober 2014 (Bukti T-5) adalah sebesar Rp. 71.473-012-479,- (tujuh puluh satu milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta dua belas ribu empat ratus tujuh puluh sembilan Rupiah).

5. Bahwa oleh karena dana hasil penjualan agunan milik para kreditor separates masih ada yang belum dibagikan, maka Kurator kemudian menyusun Daftar Pembagian Tahap II Harta Pailit PT. Integra Lestari (Dalam Pailit) tertanggal 28 Oktober 2014 (Bukti T-6) yang telah disetujui oleh Hakim Pengawas sebagaimana Penetapan Hakim Pengawas Nomor : 06/ PKPU/2013/PN.Niaga.Sby. tanggal 29 Oktober 2014.
6. Bahwa adapun dana yang dibagikan dalam Daftar Pembagian Tahap II tersebut adalah merupakan dana cadangan hasil penjualan agunan yang belum dibagikan kepada Kreditor Separates sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar Rupiah) yang telah dibagi oleh Tim

Kurator sebagai berikut :

- a. Biaya Kepailitan sebesar Rp. 106.116-770,- (seratus enam juta seratus enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh Rupiah)
- b. Dana cadangan untuk proses pemberesan selanjutnya sebesar Rp. 750.000.000,(tujuh ratus lima puluh juta Rupiah)
- c. Dana tunai yang dibagikan kepada para kreditor adalah sebesar Rp.29.143.883.230,- (dua puluh sembilan milyar seratus empat puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh Rupiah), yang dibagikan kepada :

- 1) Tagihan pesangon sebanyak 326 (tiga ratus dua puluh enam) pekerja/buruh yang diakui berdasarkan Daftar Pesangon Karyawan PT. Integra Letari (Dalam Pailit) tanggal 30 September 2014 dan tanggal 7 Oktober 2014 adalah total sebesar Rp.7.007.817.872,- (tujuh milyar tujuh juta delapan ratus tujuh belas ribu delapan ratus tujuh puluh dua Rupiah). Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 67/PUU-XI/2013 tanggal 11 September 2014 tagihan pesangon tersebut LEBIH TINGGI DARI PADA HAK NEGARA (IN CASU UTANG PAJAK DARI PELAWAN), oleh karena itu dana yang dibagikan kepada 326 karyawan tersebut adalah sebesar Rp. 7.007.817.872,- (tujuh milyar tujuh juta delapan ratus tujuh belas ribu delapan ratus tujuh puluh dua Rupiah), sebagaimana terperinci dalam Daftar Pembagian Tahap II Harta Pailit PT. Integra Lestari (Dalam

Pailit) Tanggal 28 Oktober 2014 bagian Pesangon Karyawan (Bukti T-8).

- 2) Tagihan Kreditor Konkuren yang diakui berdasarkan Daftar Kreditor Konkuren PT. Integra Lestari (Dalam Pailit) tertanggal 3 September 2013, tanggal 19 Maret 2014 dan tanggal 28 Oktober 2014 adalah total sebesar Rp.53.795.646.839,- (lima puluh tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh sembilan Rupiah).
- 3) Tagihan Kreditor Separatis yang diakui berdasarkan Daftar Kreditor Separatis PT. Integra Lestari (Dalam Pailit) tertanggal 3 September 2013 adalah total sebesar Rp. 380.606.607.811,- (tiga ratus delapan puluh milyar enam ratus enam juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus sebelas Rupiah).
- 4) Tagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto yang diakui berdasarkan Daftar Kreditor Preferen PT. Integra Lestari (Dalam Pailit) tertanggal 3 September 2013 adalah sebesar Rp.15.001.560.247,50,- (lima belas milyar satu juta lima ratus enam puluh ribu dua ratus empat puluh tujuh Rupiah koma lima puluh sen).

Sehingga seharusnya sisa dana tunai sebesar Rp.20.636.065-358,- (dua puluh milyar enam ratus tiga puluh enam juta enam puluh lima ribu tiga ratus lima puluh delapan Rupiah) setelah dikurangi pembagian kepada kreditor utang harta pailit (upah pekerja) sebesar Rp.7.007.817.872,- (tujuh milyar tujuh juta delapan ratus tujuh belas

ribu delapan ratus tujuh puluh dua Rupiah) dan dikurangi pembagian kepada kreditor konkuren sebesar Rp.1.500-000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah) harus dibagikan kepada Kreditor Separatis karena aset yang dijual adalah merupakan aset jaminan milik Kreditor Separatis, sedangkan KPP Mojokerto sebagai kreditor preferen yang kedudukannya berada di bawah Kreditor Separatis dan berada di bawah tagihan pekerja/buruh tidak mendapatkan bagian apapun.

Namun demikian dengan berdasarkan asas kepatutan dan keadilan maka Hakim Pengawas telah mempertimbangkan untuk memberikan bagian kepada KPP Mojokerto (Pelawan) sebesar 50 % (lima puluh persen) dari sisa dana tunai sebesar Rp.20.636.065.358,- yang dibagikan kepada masing-masing kreditor separates adalah sebesar Rp.10.318.032.679,- (sepuluh milyar tiga ratus delapan belas juta tiga puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan Rupiah) sebagaimana terperinci dalam Daftar Pembagian Tahap II Harta Pailit PT. Integra Lestari (Dalam Pailit) Tanggal 28 Oktober 2014 bagian Kreditor Separatis (Bukti T-10) dan bagian yang dibagikan kepada KPP Mojokerto adalah sebesar Rp.10.318.032.679,- (sepuluh milyar tiga ratus delapan belas juta tiga puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan Rupiah) sebagaimana terperinci dalam Daftar Pembagian Tahap II Harta Pailit PT. Integra Lestari (Dalam Pailit) Tanggal 28 Oktober 2014 bagian Kreditor Preferen (Bukti T-11).

7. Berdasarkan hal tersebut, maka pembagian yang dilakukan oleh Tim Kurator kepada para kreditor PT. Integra Lestari (Dalam Pailit)

sebagaimana Daftar Pembagian Tahap II Harta Pailit PT. Integra Lestari (Dalam Pailit) Tanggal 28 Oktober 2014 telah sesuai dengan hukum dan tidak melanggar Undang-Undang sebagaimana didalilkan oleh Pelawan.

Bahwa kemudian Majelis Hakim yang mengadili perkara perlawanan No. 24/Plw.Pailit/2014/PN.Niaga.Sby Jo No.06/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby di Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan yaitu menolak gugatan Pelawan yaitu KPP Mojokerto berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa pembagian yang dilakukan oleh TERLAWAN kepada para kreditor PT. Integra Lestari (Dalam Pailit) sebagaimana Daftar Pembagian Tahap II Harta Pailit PT. Integra Lestari (Dalam Pailit) Tanggal 28 Oktober 2014 telah sesuai dengan hukum dan tidak melanggar undang-undang sebagaimana didalilkan oleh PELAWAN dan terbukti TERLAWAN telah memberikan perlindungan terhadap kepentingan negara dalam hal ini PELAWAN/ Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto karena TERLAWAN tetap memberikan bagian kepada PELAWAN sebesar Rp.10.318.032.679,- (sepuluh milyar tiga ratus delapan betas juts tiga puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan Rupiah), meskipun SEHARUSNYA berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 67/PUU-XI/2013 tanggal 11 September 2014 PELAWAN tidak mendapatkan bagian apapun karena Kreditor Separatis sendiri belum mendapatkan bagiannya secara penuh, maka keberatan yang diajukan oleh PELAWAN terhadap Daftar Pembagian

Tahap II Harta Pailit PT. Integra Lestari (Dalam Pailit) Tanggal 28 Oktober 2014, tidak beralasan dan harus ditolak, sedangkan terhadap Daftar Pembagian Tahap II Harta Pailit PT. Integra Lestari (Dalam Pailit) Tanggal 28 Oktober 2014 tidak perlu dilakukan perbaikan (revise) karena Daftar Pembagian Tahap II Harta Pailit PT. Integra Lestari (Dalam Pailit) tanggal 28 Oktober 2014 sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mencerminkan asas keadilan, merata dan seimbang (pare passu pro rata parte) serta mengikat Debitor dan para kreditor PT. Integra Lestari (Dalam Pailit) baik kreditor separatis, kreditor preferen termasuk kantor pajak maupun kreditor konkuren.

Berdasarkan Kasus Kepailitan PT. Integra Lestari tersebut, maka Kurator PT. Integra Lestari telah melaksanakan tugasnya sesuai UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dan asas- asas kepailitan dalam mengimplementasikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 67/PUU-XI/2013. Bahwa dengan adanya putusan perkara No. 24/Plw.Pailit/2014/PN.Niaga.Sby Jo No.06/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby maka telah memberi kepastian Hukum bagi Kurator untuk menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 67/PUU-XI/2013 dalam hal mendahulukan hak-hak pekerja/ karyawan.

B. Upaya dan tanggung jawab Kurator melaksanakan hak-hak pekerja setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013.

Dalam proses kepailitan, Kurator dan Hakim Pengawas memegang peranan yang sangat penting dan menentukan. Dimulai dari pengurusan harta

pailit, penentuan daftar urutan pembagian melalui rapat kreditor, hingga pemberesan harta pailit saat terjadi keadaan insolvensi yang secara keseluruhan membutuhkan kecermatan dan ketelitian kurator dan hakim pengawas. Pada peran posisi yang sangat penting dan menentukan tersebut, tentunya bahwa obyektivitas dan integritas kurator dan hakim pengawas tersebut harus dijaga.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa bisa terjadi tindakan kesewenangan yang dilakukan kurator untuk kepentingan sendiri. Hal tersebut dapat saja terjadi apabila kurator yang sebagai salah satu pihak yang memegang posisi yang sangat penting dan menentukan dalam perkara kepailitan tidak mendahulukan pembayaran upah kepada pekerja/buruh pada saat pembagian harta pailit.

Potensi kesewenangan tersebut dapat terjadi mengingat adanya kemungkinan jumlah kreditor yang jumlahnya banyak maupun jumlah harta *boedel* pailit yang tidak mencukupi untuk memenuhi pembayaran utang. Apabila terdapat permasalahan atas tindakan kesewenangan yang dilakukan kurator maka pekerja dapat menempuh upaya hukum apabila pekerja/buruh tidak mendapatkan haknya sebagaimana perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Alfin Sulaiman⁷³, bahwa konsepsi dalam ketentuan UU Kepailitan dan PKPU sesungguhnya sudah tepat memberikan pengaturan terhadap upaya perlawanan terhadap Kurator akibat adanya kerugian atas

⁷³ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53560215cad4f/hak-imunitas-profesi-kurator-dan-pengurus-broleh--alfin-sulaiman--sh--mh->

tindakan yang dilakukan Kurator. Pihak yang dirugikan dalam hal ini pekerja/buruh dapat menggunakan mekanisme ketentuan Pasal 77 UU Kepailitan dan PKPU dengan mengajukan Keberatan kepada Hakim Pengawas. Dalam Pasal 77 UU Kepailitan dan PKPU menyatakan :

1. Setiap Kreditor, panitia kreditor, dan Debitor Pailit dapat mengajukan surat keberatan kepada Hakim Pengawas terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Kurator atau memohon kepada Hakim Pengawas untuk mengeluarkan surat perintah agar Kurator melakukan perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan yang sudah direncanakan.
2. Hakim Pengawas harus menyampaikan surat keberatan kepada Kurator paling lambat 3 (tiga) hari setelah surat keberatan diterima.
3. Kurator harus memberikan tanggapan kepada Hakim Pengawas paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima surat keberatan.
4. Hakim Pengawas harus memberikan penetapan paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggapan dari Kurator diterima.

Selain itu juga dalam UU Kepailitan dan PKPU juga mengatur upaya hukum lainnya. Upaya hukum tersebut yaitu gugatan renvoi yang merupakan upaya hukum untuk menyatakan keberatan atau koreksi atas perhitungan tagihan yang dilakukan oleh kreditor ataupun kurator. Gugatan renvoi diatur dalam Pasal 127 ayat (1) dan (3) UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan :

1. Dalam hal ada bantahan sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan, Hakim Pengawas memerintahkan kepada kedua

belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan.

2. ...

3. Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa secara sederhana.

Pada penjelasan pasal tersebut yakni bahwa pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan bantahan atas perhitungan tagihan yang dimana perselisihan tersebut diselesaikan di pengadilan dan perkara tersebut diperiksa secara sederhana. Pengaturan ketentuan-ketentuan tersebut dalam UU Kepailitan dan PKPU adalah untuk memberikan perlindungan kepada *stakeholders* dalam proses Kepailitan dan PKPU, baik Debitur, Kreditur ataupun pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap tindakan yang menyebabkan kerugian yang dilakukan oleh Kurator.

Dalam pasal-pasal tersebut telah mengatur tentang upaya hukum untuk melindungi pekerja/buruh yang mengalami kerugian akibat adanya penyimpangan tindakan terhadap kurator atas tidak mendahulukan pembayaran upah kepada pekerja/buruh pada saat pembagian harta pailit.

Menurut hasil wawancara Peneliti, Kurator dalam menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip *fiduciary duty* yang artinya tugas yang diembankan didasarkan oleh kepercayaan yang mengangkat kurator tersebut yaitu pengadilan. Kurator harus menjunjung tinggi integritasnya yang berupa kejujuran dan dapat dipercaya serta tidak mementingkan kepentingan pribadi. Integritas mengharuskan kurator untuk bersikap objektif dan menjalankan profesinya secara cermat dan seksama. Apabila pekerja/buruh sebagai kreditor tidak memperoleh hak sebagaimana mestinya maka dapat melakukan tuntutan

kepada kurator sebagaimana yang diatur dalam Pasal 72 UU Kepailitan dan PKPU yang menyebutkan bahwa: “*Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengelolaan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit*”. Akan tetapi di dalam Undang-Undang ini tidak secara terperinci menyebutkan tentang tanggung jawab seperti apa yang diberikan oleh pihak kurator jika terjadi kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit tersebut.

Pengertian mengenai tanggung jawab terdapat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan :

1. Keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb).
2. Fungsi menerima beban, sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain.

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara actual dan potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan, dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang

dilaksanakan. Istilah *liability* dalam pengertian dan penggunaan praktis menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.⁷⁴

Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut⁷⁵:

1. Prinsip tanggung jawab karena kesalahan (*liability based on fault*) adalah prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Prinsip ini menyatakan, dimana seseorang baru dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum apabila adanya unsur kesalahan yang dilakukan. Dalam sistem hukum perdata misalnya, ada prinsip perbuatan melawan hukum (*onrehtmatige daad*) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Pada Pasal 1365 KUHPerdata yang dikenal tentang pasal Perbuatan Melawan Hukum mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok yaitu adanya perbuatan, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian yang diderita, dan adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian. Yang dimaksud dengan kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian “hukum”, tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga

⁷⁴ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 335-337.

⁷⁵ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006) hlm. 73.

bertentangan dengan kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat.⁷⁶

2. Prinsip praduga selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*) memiliki arti bahwa prinsip ini menyatakan tergugat selalu dianggap bertanggung jawab yang dimana beban pembuktian ada pada tergugat.
3. Prinsip praduga tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of non-liability*) yang memiliki arti bahwa prinsip ini menyatakan tergugat tidak selamanya bertanggung jawab. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya *common sense* dapat dibenarkan. Contoh dari penerapan prinsip ini adalah pada hukum pengangkutan dimana kehilangan atau kerusakan pada kabin/bagasi tangan yang biasanya dibawa dan diawasi penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang (konsumen) dan dalam hal ini pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat diminta pertanggungjawabannya.
4. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) yang memiliki arti bahwa prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip pertama, yaitu *liability based on fault*. Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen tanpa harus membuktikan ada atau tidaknya kesalahan pada dirinya. Tanggung jawab mutlak atau *strict liability* juga memiliki arti bahwa kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar ganti kerugian, ketentuan ini merupakan *lex*

⁷⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm. 92.

specialis dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya.

5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability*) yakni prinsip yang sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standard yang dibuatnya. Dalam perjanjian cuci cetak film misalnya jika film yang ingin dicuci/cetak itu hilang atau rusak (termasuk apabila kesalahan petugas) maka ganti kerugian hanya dibatasi yaitu sepuluh kali dari harga satu roll film baru. Prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan konsumen bila ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha.

Tanggung jawab adalah suatu prinsip pokok bagi kaum profesional, orang yang profesional sudah seharusnya sebagai orang yang bertanggungjawab dengan kata lain yaitu dapat bertanggungjawab melaksanakan pekerjaannya sebaik mungkin dan dengan hasil yang memuaskan. Pada tingkat dimana profesinya itu membawa kerugian tertentu baik disengaja maupun tidak disengaja, maka harus mempertanggungjawabkan kerugian tersebut yang bentuknya bermacam-macam seperti terdiri dari mundur dari jabatan yang diemban, mengganti kerugian, dan sebagainya.

Tanggung jawab dalam kurator dapat dikategorikan sebagai salah satu profesi yang harus mengandalkan prinsip kehati-hatian. Pada saat menjalankan profesinya, kurator harus diupayakan bekerja secara profesional yakni harus mendahulukan pembagian upah pekerja/buruh dalam kepailitan. Pasal 72 UU Kepailitan dan PKPU menentukan bahwa kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan dan kelalaiannya melaksanakan tugasnya sebagai kurator. Ini berarti

kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan tidak dapat bertindak sewenang-wenang, karena apabila ada perbuatan kurator yang merugikan pada saat pembagian harta pailit, maka harta pribadi kurator turut bertanggungjawab atas perbuatan tersebut.⁷⁷

Menurut Jerry Hoff, tanggung jawab kurator dapat dibedakan dua macam:

1. Tanggung jawab kurator dalam kapasitas kurator yaitu memiliki arti bahwa tanggung jawab kurator dalam kapasitas sebagai kurator yang beban kerugiannya dibebankan pada harta pailit, dan bukan pada kurator secara pribadi yang harus membayar kerugian. Pihak yang berhak menuntut adalah yang mempunyai tagihan atas harta kepailitan, dan tagihannya adalah utang harta pailit. Kerugian yang timbul sebagai akibat dari tindakan kurator tersebut tidaklah menjadi beban harta pribadi kurator melainkan harta pailit.
2. Tanggung jawab pribadi kurator yaitu memiliki arti bahwa tindakan-tindakan kurator yang memerlukan persetujuan hakim pengawas dilaksanakan tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari hakim pengawas. Kurator dalam hal ini dapat diminta pertanggungjawaban secara pribadi berdasarkan ketentuan Pasal 72 UU Kepailitan dan PKPU.

Kesalahan dan kelalalaian kurator secara implisit merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Mengenai perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara disebutkan bahwa setiap perbuatan melawan hukum, yang dapat menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena

⁷⁷ Jono, Op-Cit., hlm. 151.

kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Hal tersebut juga demikian dengan kurator yang melakukan kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit debitur, kurator harus mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dalam kapasitas tanggung jawab sebagai kurator maupun tanggung jawab secara pribadi kurator dan kurator harus membayar sendiri kerugian yang ditimbulkannya.

Berdasarkan hasil informasi yang Peneliti dapatkan mengenai tanggung jawab atas kesalahan dan kelalaian kurator, maka kurator dapat digugat dengan mengajukan upaya hukum yaitu gugatan renvoi yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) dan (3) UU Kepailitan dan PKPU. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kurator mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap pengelolaan perusahaan yang pailit. Apabila kurator tidak mendahulukan pembayaran upah pekerja/buruh maka kurator dapat digugat secara perdata yaitu melalui gugatan renvoi. Namun apabila kurator tidak mendahulukan pembayaran pajak, maka kurator dapat dipidana karena tidak mendahulukan pembayaran pajak kepada Negara sesuai dengan Pasal 38 UU Perpajakan yakni mengatakan bahwa *“Setiap orang karena kealpaannya sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun”*. Padahal Negara sebenarnya telah memiliki pembiayaan lainnya selain pajak sedangkan upah pekerja/buruh

sebagai sumber untuk menghidupi diri dan keluarganya. Maka sudah semestinya ada peraturan-peraturan yang jelas dan terperinci untuk mengatur tanggung jawab dan sanksi terhadap kurator agar kurator tidak menyalahi aturan dalam menjalankan tugasnya.

Bahwa upaya Kurator dalam melaksanakan pemenuhan hak buruh yang tidak menjadi tanggung jawab Kurator sepenuhnya. Tanggung jawab yang dimiliki oleh kurator dapat menimbulkan kesan bahwa kurator menggantikan kedudukan direksi/komisaris, termasuk pemenuhan kewajiban hak-hak pekerja/ karyawan. Perlu diingat bahwa kurator tidak menggantikan kedudukan direksi/komisaris sehubungan dengan pengurusan harta kekayaan perusahaan pailit. Kurator hanya bertanggung jawab atas pengurusan dan pemberesan kekayaan perusahaan. Kewajiban dan tanggung jawab sebagai pengurus perusahaan, di luar pengurusan kekayaan perusahaan tetap berada di tangan direksi dan komisaris.⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan James Purba, Kurator dan Ketua Umum AKPI, bahwa tanggung jawab Kurator dan perlindungan hukum terhadap kurator harus diperkuat dan jelas. Sejauh mana batasan kesalahan dan kelalaian kurator dalam melaksanakan tugas pengurusan atau pemberesan harta pailit. Disamping kurator diberi tanggungjawab, juga harus ada perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas Kurator. Dengan demikian perlu adanya

⁷⁸ Amir Abadi Jusuf. 2004. Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris Perusahaan Pailit. Dalam Emmy Yuhassarie (Ed.), *Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya* (hlm. 251-256). Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum

revisi Undang-undang Kepailitan dan PKPU agar memberikan kepastian hukum bagi Kurator dalam melaksanakan tugasnya khususnya dalam mengimplementasikan Putusan Mahkamah Konstitusi No 67 /PUU-XI/2013.

C. Kendala Yang Dihadapi Kurator Dalam Mengakomodasi Hak-Hak Pekerja/Buruh Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 Dan Upaya Mengatasi Kendala Tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan pada Seminar Kepailitan dan Pendidikan Lanjutan Kurator dengan tema “*Utang Pajak vs Upah Buruh : Siapa mendahului?*” yang diselenggarakan pada tanggal 17 November 2017 oleh Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) bekerjasama dengan Universitas Ubaya, maka menurut Para Pembicara yang terdiri dari James Purba, S.H., M.H. yang juga sebagai Ketua AKPI, Imran Nating, S.H., M.H. sebagai Sekretaris Jenderal AKPI, menyatakan kendala-kendala yang dihadapi Kurator dalam mengakomodasi hak-hak pekerja/buruh setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 adalah sebagai berikut :

1. Kendala Yuridis, adanya ketentuan dalam UU No 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mengatur jika Kreditor Separatis dapat menjual sendiri boedel pailit seolah olah tanpa adanya kepailitan. Pasal 55 UU Kepailitan dan PKPU menyatakan :

(1) *Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau*

hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

Bahwa dengan adanya ketentuan tersebut maka kendala yang dihadapi Kurator yaitu Kreditor Separatis dapat menjual sendiri boedel pailit dan hasil dari penjualan tersebut dapat digunakan untuk membayarkan tagihan Kreditor Separatis itu sendiri. Dengan demikian tidak ada kewajiban bagi Kreditor Separatis untuk membagi hasil penjualan kepada pekerja/karyawan karena upah buruh adalah tanggung jawab perusahaan.

Bahwa berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Imran Nating, selaku Kurator dan Sekretaris Jenderal AKPI, mengatakan memang belum ada payung hukum yang mengatur bagaimana upaya yang harus dilakukan apabila Kreditor Separatis melakukan penjualan boedel pailit dan mengambil seluruh hasil dari penjualan seluruhnya, maka perlu kreatifitas bagi kurator berkomunikasi bagus dengan perbankan selaku Kreditor Separatis, dan berkomunikasi bagus dengan calon pembeli lelang. Berdasarkan pengalamannya, Imran Nating mengatakan saat menangani Kepailitan di Surakarta yang dilakukan adalah ketika Kurator tahu ada *standby buyer* yang siap mengikuti lelang, kemudian Kurator dapat menyampaikan kepada calon *buyer* jika ada tagihan buruh sebesar sekian yang pasti tidak akan mendapat haknya karena telah dihabiskan oleh kreditur separatis, kemudian Kurator dapat meminta/ menawarkan kepada pembeli lelang untuk menyisihkan hasil sisa dari pelelangan guna membayar upah buruh.

Namun perlu diperhatikan jika upaya Kurator tersebut adalah berkaitan dengan praktik dan tidak diatur Undang-undang. Proses pendekatan yang dilakukan Kurator dapat dilakukan sebelum lelang dilaksanakan, dan kurator dilarang melakukan pendekatan kepada calon buyer waktu proses lelang, jika masih ada kekurangan, Kurator juga bisa melakukan pendekatan kepada Perbankan sebagai Kreditor Separatis untuk membantu menyisihkan hasil penjualan boedel pailit untuk membayar upah buruh jika terdapat sisa penjualan boedel pailit. Pada umumnya Calon buyer dan Kreditor Separatis bersedia menyisihkan hasil penjualan boedel pailit untuk membantu Kurator membayar upah buruh. Hal tersebut juga agar menghindari aksi buruh dalam mengganggu proses penjualan harta pailit jika ternyata upah buruh tidak terbayarkan. Bahwa kurator juga dapat menyisihkan fee nya untuk menambah kekurangan pembayaran upah buruh, namun hal tersebut tidaklah kewajiban Kurator dan merupakan keputusan masing-masing Kurator.

2. Terdapat ketidaksinkronan dalam Undang- Undang Kepailitan yang menjadi dasar Kurator untuk mendahulukan pembayaran hak karyawan berupa upah tertunggak berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013. Bahwa ketidaksinkronan dalam Undang- undang Kepailitan tersebut terdapat dalam pasal 55 yang bertentangan dengan pasal 60 ayat 2 UU No 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Bahwa Pasal 55 ayat 1 UU Kepailitan dan PKPU menyatakan “ *Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap*

Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.”

Bahwa pasal 55 tersebut di atas bertentangan dengan Pasal 60 ayat 2 UU Kepailitan dan PKPU menyatakan : *“Atas tuntutan Kurator atau Kreditor yang diistimewakan yang kedudukannya lebih tinggi daripada Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Kreditor pemegang hak tersebut wajib menyerahkan bagian dari hasil penjualan tersebut untuk jumlah yang sama dengan jumlah tagihan yang diistimewakan.*

Ketidaksinkronan Undang- undang Kepailitan dan PKPU tersebut membuat Kurator tidak dapat mendahulukan upah pekerja/karyawan dari Kreditor Separatis. Yang menjadi kendala kemudian jika ternyata tidak ada sisa dari hasil penjualan boedel pailit yang dilakukan Kreditur Separatis untuk melunasi tagihannya, maka Kurator tidak dapat membagi upah buruh/ karyawan yang mestinya harus didahulukan dari kreditor separatis berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013.

Berdasarkan pengalaman Bapak James Purba, biasanya jika buruh melihat harta pailit satu- satunya hanya dimiliki oleh kreditor separatis dalam hal ini bank, maka buruh akan melakukan upaya seperti demonstrasi, menduduki pabrik, demo bank, mengadu ke hakim pengawas. Karena memang belum ada aturan dalam Undang- Undang Kepailitan dalam

praktek yang ditempuh oleh para kurator jika terjadi kasus tersebut, maka upaya yang dapat dilakukan Kurator yaitu melakukan kompromi dengan Perwakilan Pekerja dan dari Pihak Kreditor Separatis.

Jika Kreditor Separatis menyetujui agar kurator yang melakukan penjualan boedel pailit, maka Kurator harus terlebih dahulu meminta izin dari Hakim Pengawas, dalam melaksanakan penjualan harta pailit. Izin dari Hakim Pengawas ini dituangkan dalam suatu penetapan. Izin penetapan ini diperoleh setelah kurator terlebih dahulu mengajukan permohonan untuk melakukan penjualan harta pailit dan dapat dilakukan secara lelang di depan umum maupun secara di bawah tangan. Sehingga jika Kurator yang melakukan penjualan boedel pailit, Kurator dapat menyerahkan bagian dari hasil penjualan untuk membayar Pekerja/ karyawan berdasarkan Pasal 55 UU Kepailitan dan PKPU, namun jika jika kreditor separatis menolak menyerahkan agunan kepada kurator, Kurator tidak dapat berbuat apa-apa karena masalah tersebut belum diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU. Untuk itu perlu adanya revisi UU Kepailitan dan PKPU agar terdapat kepastian hukum untuk mengatasi kendala tersebut.

3. Adanya Ketentuan yang mengatur jika tagihan pajak didahului dari hak mendahului lainnya. Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat 1 Ketentuan Umum Perpajakan menyatakan : *“Negara mempunyai hak mendahului untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak”*. Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut menyatakan *“Ayat ini menetapkan kedudukan negara sebagai kreditur preferen yang dinyatakan mempunyai hak mendahului atas barang-barang milik Penanggung Pajak yang akan*

dilelang di muka umum. Pembayaran kepada kreditur lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi.”. Bahwa di dalam praktek, seringkali pegawai pajak menggunakan Pasal 21 Ketentuan Umum Perpajakan tersebut untuk mempengaruhi Kurator agar mendahulukan tagihan pajak lebih dahulu daripada tagihan upah buruh dalam melakukan pembagian harta pailit, sehingga hal tersebut membuat Kurator menjadi dilematis apakah mendahulukan tagihan pajak ataupun tagihan upah buruh terlebih dahulu.

Bahwa upaya untuk mengatasi kendala tersebut, Kurator dapat menggunakan asas hukum *lex posteriori derogate legi priori* yaitu hukum terbaru mengesampingkan hukum yang lama, sehingga oleh karena Putusan Mahkamah Konstitusi lebih dahulu dari Ketentuan umum perpajakan, maka tidak ada keraguan bagi Kurator untuk mendahulukan pembayaran upah pekerja/karyawan daripada tagihan pajak. Kurator harus dapat mengambil keputusan untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi, karena jika menunggu reformasi Undang-undang Kepailitan dan Undang- undang Perpajakan akan memerlukan waktu lama dan akan merugikan posisi buruh sendiri dalam mendapatkan hak-hak pekerja yang tertunggak akibat kepailitan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tugas Kurator dalam mengimplementasikan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 saat ini masih berdasarkan pada ketentuan dalam Undang-undang No.37 Tahun 2004. Sedemikian pentingnya tugas kurator maka dalam putusan pernyataan pailit langsung mengangkat kurator dan hakim pengawas seperti tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang No.37 Tahun 2004. Berdasarkan Undang- undang No.37 Tahun 2004,tugas dan wewenang kurator yaitu :
 - a. Kurator berwenang menjalankan tugasnya sejak tanggal putusan pailit diucapkan.
 - b. Kurator dapat mengambil alih perkara dan meminta Pengadilan untuk membatalkan segala perbuatan hukum debitor pailit.
 - c. Kurator berwenang untuk melakukan pinjaman pada pihak ketiga.
 - d. Tindakan Kurator tetap sah walaupun tanpa adanya izin dari hakim pengawas.
 - e. Kurator berwenang untuk mengamankan harta pailit.
 - f. Kurator berwenang menerobos hak privasi debitor pailit.
 - g. Kurator berwenang menjual harta pailit.
2. Upaya dan tanggung jawab kurator melaksanakan hak-hak pekerja/buruh

setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 yaitu Kurator dalam menjalankan tugasnya harus berdasarkan prinsip *fiduciarie duty* yang artinya tugas yang diembankan didasarkan oleh kepercayaan yang mengangkat kurator tersebut yaitu pengadilan. Kurator harus menjunjung tinggi integritasnya yang berupa kejujuran dan dapat dipercaya serta tidak mementingkan kepentingan pribadi. Integritas mengharuskan kurator untuk bersikap objektif dan menjalankan profesinya secara cermat dan seksama. Apabila pekerja/buruh sebagai kreditor tidak memperoleh hak sebagaimana mestinya, maka pekerja/ karyawan dapat melakukan tuntutan kepada kurator sebagaimana yang diatur dalam Pasal 72 UU Kepailitan dan PKPU yang menyebutkan bahwa: *“Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengelolaan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit”*. Akan tetapi di dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak secara terperinci menyebutkan tentang tanggung jawab seperti apa yang diberikan oleh pihak kurator jika terjadi kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit tersebut.

3. Kendala yang dihadapi Kurator dalam mengakomodasi hak-hak pekerja/buruh setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 yaitu :

a. Kendala Yuridis, adanya ketentuan dalam Pasal 55 UU No 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mengatur jika Kreditor Separatis dapat menjual sendiri boedel pailit seolah olah tanpa adanya kepailitan sehingga Kreditor Separatis dapat menjual

sendiri boedel pailit dan mengambil hasil dari penjualan tersebut untuk membayarkan tagihan Kreditor Separatis itu sendiri. Dengan demikian tidak ada kewajiban bagi Kreditor Separatis untuk membagi hasil penjualan kepada pekerja/karyawan karena upah buruh adalah tanggung jawab perusahaan.

- b. Ketidaksinkronan Undang- undang Kepailitan dan PKPU membuat Kurator tidak dapat mendahulukan upah pekerja/karyawan dari Kreditor Separatis. Yang menjadi kendala kemudian jika ternyata tidak ada sisa dari hasil penjualan boedel pailit yang dilakukan Kreditor Separatis untuk melunasi tagihannya, maka Kurator tidak dapat membagi upah buruh/karyawan yang mestinya harus didahulukan dari kreditor separatis berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU- XI/2013.
- c. Adanya Ketentuan yang mengatur jika tagihan pajak didahului dari hak mendahului lainnya. Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat 1 Ketentuan Umum Perpajakan menyatakan : *“Negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak”*. Hal tersebut membuat Kurator menjadi dilematis untuk mendahulukan tagihan upah pekerja atau mendahulukan tagihan pajak.

B. SARAN

- 1. Revisi terhadap Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang saat ini sedang dalam proses seharusnya memberikan pengaturan tentang kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan Kurator, pelaksanaan hak-hak kreditor separatis, kreditor pajak, kreditor dengan hak

retain dan kreditor buruh sehubungan dengan pembagian hasil penjualan boedel pailit.

2. Untuk mengatasi kendala-kendala Yuridis yang dihadapi oleh kurator dalam menjalankan tugasnya dan mengimplementasikan Putusan Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013, seharusnya ada harmonisasi Peraturan Perundang-undangan antara Undang-undang Kepailitan, Undang- undang Ketenagakerjaan dan Ketentuan Umum Perpajakan yang mengatur dengan tegas jika upah pekerja/karyawan adalah didahulukan dari kreditor separatis dan tagihan negara, maka tidak akan ada lagi perdebatan mengenai urutan hak mendahului dalam pembagian boedel pailit sehingga Kurator dapat melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja/karyawan berdasarkan kepastian hukum dan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agusmidah., 2010, *Dinamika dan Kajian Teori Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, 1999, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Asikin Zainal., 2001, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Van Apeldoorn. L. J., 1993 *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta,.
- Bintoro Tjokroamidjojo dan Mustofa Adijoyo, 1988, *Teori dan Strategi Pembangunan Nasional*, Jakarta : CV. Haji Mas Agung
- Indah C. Maya, 2010, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Salatiga : Widya Sari press.
- Hartini Rahayu., 2012, *Hukum Kepailitan*, Malang : UMM Press
- J. Djohansyah, tanpa tahun terbit, *Pengadilan Niaga dalam Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (tanpa penerbit, tanpa tempat terbit)
- Jusuf Amir Abadi., 2004. *Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris Perusahaan Pailit. Dalam Emmy Yuhassarie (Ed.), Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum
- Jono., 2010, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Kristiyanti Celina Tri Siwi., 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Sinar Grafika
- Lawrence M. Friedman dalam Esmi Warasih, 2005, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: PT. Suryandaru Utama,
- Moleong Lexy J., 2000, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung : PT.Remaja Rosda Karya
- Munir Fuady, 1999, *Hukum Pailit (Dalam Teori Dan Praktek)*, Ctk.Pertama, Bandung: Citra Aditya Bakti

- Mertokusumo Sudikno., 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia, edisi keenam*, Yogyakarta: Liberty
- , 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty
- Nasution, S., 1998, *Metode Penelitian Naturalistik*, Bandung: Pustaka Setia
- Nating Imran., 2004, *Peranan dan Tanggung jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Purwosutjipto, 1992, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 8: Perwasitan, Kepailitan, dan Penundaan Pembayaran*, Jakarta: P.T Djambatan
- Phillipus M Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT Bina Ilmu
- Pane Marjan E., 2004, *Inventarisasi Dan Verifikasi Dalam Rangka Pembersihan Harta Pailit Dalam Pelaksanaannya. Dalam Emmy Yuhassarie (Ed.), Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah- masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana.,
- Rahardjo Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.,
- Soemitro, Ronny Hanitijo., 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Sutantio Retnowulan., 2001, *Tanggung Jawab Pengurus Perusahaan Debitor Dalam Kepailitan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- Setiawan, 2001, *Ordonansi Kepailitan Serta Aplikasinya Kini. Dalam Rudhy A. Lontoh dkk (Ed.), Penyelesaian Utang-piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni
- Setijoprodjo Bambang., 2001, *Segi-segi Hukum Kepailitan dan Likuidasi Ditinjau Dari Perspektif Bank. Dalam Rudhy A. Lontoh dkk (Ed.), Penyelesaian Utang-piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni
- Suyatno Thomas., 2001, *Bank Indonesia, Bank Tidak Sehat, BPPN dan Masalah Kepailitan. Dalam Rudhy A. Lontoh dkk (Ed.), Penyelesaian Utang-piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni
- Suhandjono., 2001, *Fungsi Kejaksaan Dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara serta Pengertian Kepentingan Umum dalam Kepailitan. Dalam*

Rudhy A. Lontoh dkk (Ed.), Penyelesaian Utang piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Bandung: Alumni

Sukirno Timur, 2001, *Tanggung Jawab Kurator terhadap Harta Pailit dan Penerapan Actio Pauliana. Dalam Rudhy A. Lontoh dkk (Ed.), Penyelesaian Utang-piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni

Sjahdeini Sutan Remy, 2002, *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti

-----, 2009, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti

Setiawan., 2004, *Beberapa Catatan Tentang Pengertian Jatuh Tempo Dalam Masalah Kepailitan. Dalam Emmy Yuhassarie (Ed.), Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum

Simanjuntak Ricardo., 2004, *Esensi Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan. Dalam Emmy Yuhassarie (Ed.), Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum

Soekanto Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press,.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta : Rajawali Pers, ed.1, cet.14,.

Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum (Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya)*, Jakarta : ELSAM dan HUMA

Tumbuan Fred BG., 2004, *Mencermati Makna Debitor, Kreditor, dan Utang Berkaitan Dengan Kepailitan. Dalam Emmy Yuhassarie (Ed.), Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum

Usman Rachmadi, 2004, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama,

Viktor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, 1993, *Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta

Waluyo Bernadette M., 1999, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Mandar Maju

Wasis, SP, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang : Universitas Muhammadiyah Malang

Wignjosumarto Parwoto., 2006, *Tugas dan Wewenang Hakim Pengawas dalam Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Makalah disampaikan pada Pelatihan Calon Hakim Pengadilan Niaga di Hotel Bumikarsa tanggal 6-11 November 2006, Jakarta

Wijayanti Asri., 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika

Viktor M. Situmorang dan Hendri Soekarso. 1993. *Pengantar Hukum Kepailitan*. Indonesia. Jakarta:Rineka Cipta.

Skripsi,Jurnal, Artikel, Seminar

Indraswari Galuh, Peranan Kurator Penanganan Perkara Kepailitan Berdasarkan Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2009

Harjono., 2008, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi,

Darma, Susilo Andi., 2013, *Kedudukan Pekerja/Buruh dalam Perkara Kepailitan Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan dan Teori Keadilan*

Lendrawati, SH., MH Rolend Santoso, Journal of Judicial Review Vol.XVII No.1 tanggal 1 Juni 2015, Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 Tentang UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Seminar Kepailitan dan Pendidikan Lanjutan Kurator dengan tema “*Utang Pajak vs Upah Buruh : Siapa mendahului?*” yang diselenggarakan pada tanggal 17 November 2017 oleh Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) bekerjasama dengan Universitas Ubaya

Internet

Gunarto, *Metode Penelitian Hukum: Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Materi Mata Kuliah Metode Penelitian Hukum, 2012 <http://profgunarto.files.wordpress.com/2012/12/mph-2.pdf>., pada tanggal 6 September 2017, pukul 13.00 WIB

HukumOnline.com. *MK pastikan hak pekerja dalam kepailitan*,Diakses dari internet <http://www.hukumonline.com>, pada tanggal 6 September 2017, pukul 13.00 WIB

HukumOnline.com. *Pembayaran Upah Buruh dalam Proses Kepailitan*. Diakses dari internet <http://www.hukumonline.com>, pada tanggal 6 September 2017, pukul 13.00 WIB